

**GERAKAN MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA
TAHUN 2000-2005**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Adab
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Humaniora**

Oleh:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**AHMAD SCBIRIN
NIM. 9912 2319**

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Herawati, S.Ag
Dosen Fakultas Adab
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Sobirin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Adab
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, memeriksa dan memberi petunjuk serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Sobirin
Nim : 9912 2319
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Judul : Gerakan Majelis Mujahidin Indonesia Tahun 2000-2005

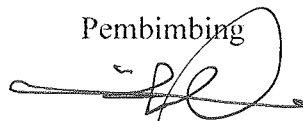
telah dapat diterima sebagai bagian dari syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Humaniora pada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Harapan kami semoga skripsi tersebut dapat diterima dan segera maju ke sidang munaqasyah. Atas perkenan bapak kami haturkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Juli 2006

Pembimbing



Herawati, S.Ag
NIP. 150 291 019



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

GERAKAN MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA TAHUN 2000-2005

Diajukan oleh :

1. Nama : AHMAD SOBIRIN
2. N I M : 99122319
3. Program : Sarjana Strata 1
4. Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Telah dimunaqasyahkan pada hari: **Rabu** tanggal **30 Agustus 2006** dengan nilai **A-** dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Humaniora (S.Hum.)**

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Dr. Muhammad Abdul Karim, M.A., M.A.
NIP.150290391

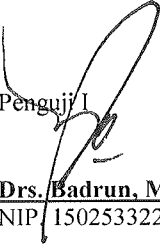
Sekretaris Sidang


Siti Maimunah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 150282645

Pembimbing /merangkap penguji,


Herawati, S.Ag.
NIP. 150291019


Penguji I


Drs. Badrun, M.Si.
NIP. 150253322

Penguji II


Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
NIP. 150267220

Yogyakarta, 2 Desember 2006
Dekan,


Drs. H. M. Syakir Ali, M.Si.
NIP. 150178285



MOTTO

أَدُخِ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ حَسَلَتْ مِنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Qs: an-Nahl: 125).

*Dalam perjalanan hidup ini, nasib memerankan perannya
takdir menegaskan ketentuannya,
norma dan hukum menetapkan atutrananya,
waktu menunjukkan eksistensinya,
dan Tuhan menentukan qadla dan qadar-Nya,
tetapi sebenarnya
kartu rahasia itu sendiri masih ada ditangan anda,
jika anda memutuskan untuk maju
dan memilih jalan yang benar,
maka anda akan menang,
dan bila anda memilih untuk menyerah,
dan berjalan di arah yang salah,
maka anda akan salah,
tentukanlah arah kehidupan,
karena hidup adalah sebuah pilihan,*

LIFE FOR GREATABLE SOUL AND MIND

PERSEMBAHAN

Skripsi ini

saya persembahkan untuk alnamaterku Tercinta

Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi berjudul “Gerakan Majelis Mujahidin Indonesia Tahun 2000-2005 M” ini, walau harus menempuh jalan yang cukup “terjal dan berliku” termasuk tragedi gempa bumi 27 Mei 2006 yang memporak porandakan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Rasa syukur perlu penyusun sampaikan, mengingat berbagai kendala telah terlewati sehingga skripsi ini dapat selesai, meski dalam jangka waktu yang kurang mengembirakan. Salam dan salawat semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw yang kita nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Selain menjadi sarana menambah wawasan penyusun, skripsi ini diselesaikan untuk memberikan sedikit sumbangan pemikiran terhadap masalah gerakan keagamaan, khususnya menyangkut masalah penerapan syari'at Islam, yang tidak kalah penting penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang menandai selesainya perjalanan panjang penyusun dalam menempuh studi Strata 1 (S1) di almamater tercinta, Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selama 14 semester telah menjadi teman, sahabat, guru, dan dosen khususnya dalam upaya penyelesaian skripsi ini. Penyusun harapkan interaksi intelektual yang sudah terbangun tetap terjaga, secara khusus penyusun menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. KH. Syakir Ali, MA, selaku Dekan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc, MA, selaku Pembantu Dekan I, yang telah banyak memperlancar segala urusan akademik penyusun.
3. Ibu Herawati, S.Ag, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu mendampingi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pengurus Pusat Majelis Mujahidin dan bagian kesekretariatan Markaz Pusat MM di Karanglo, Kotagede, Yogyakarta.

5. Kedua orang tua tercinta, Nur Salim (Alm.) dan ibu Esti B, yang telah mengasuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena terlambat pulang dan sering mengecewakan.
6. Para Kyai, Ustadz dan guru yang telah mengucurkan tetesan ilmu semenjak penyusun mengenal dunia pendidikan, baik formal maupun *non-formal* mulai Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, TK, SD, SLTP, SLTA hingga Perguruan Tinggi.
7. Para sahabat, teman, rekanan (gerakan maupun kultural) dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan namanya satu persatu.
8. Komunitas Jaringan Santri Alumni Futuhiyyah di Yogyakarta (IMAFTA), sektor MMC, (Fauzi: Skripsiku selesai di pesanggrahanmu), Iby terimakasih atas diskusi kecilnya yang boleh juga.

Akhirnya, penyusun memohon kepada Allah Swt. untuk selalu memberikan hidayah, terutama setelah penyusun lulus dari kampus ini dan berusaha menempuh "perjalanan baru". Ilmu yang selama ini didapat penyusun, seberapa sedikitpun, semoga dapat bermanfaat dan mendatangkan *mashlahah*, bukan saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Amin.

Yogyakarta, 25 Juli 2006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJARAH
YOGYAKARTA

Penyusun

AHMAD SOBIRIN
NIM. 9912 2319

ABSTRAKSI

Ketika mendengar nama Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dalam benak sebagian orang akan terlintas sosok yang berjenggot, bersorban, berpakaian ala Arab-Afghan, ortodoks, radikal, kaku dan seterusnya. Dari beberapa *stereotype* tersebut, hanya merupakan pandangan (kelompok) orang lain yang tidak benar sepenuhnya. Hal yang patut dimengerti oleh banyak pihak adalah MMI merupakan lembaga aliansi perjuangan penegakan syari'at Islam yang menolak sekularisme, liberalisme dan ingin mengubah konstitusi hukum negara Indonesia dengan hukum Islam.

Dasar pemikiran pendirian MMI ini erat kaitannya dengan keinginan sebagian umat Islam untuk mendirikan negara Islam, sebagian faksi yang bergabung dalam MMI ini berasal dari kaum pergerakan Darul Islam (DI) dari beberapa daerah, yang ingin kembali membangun kekuatan Islam, yang menurut mereka tercerai-berai sekian lama. Maka, mereka pun mengklaim bahwa MMI pada dasarnya merupakan sebuah kelanjutan dari perjuangan pergerakan Darul Islam (DI).

Para tokoh pendiri MMI adalah mereka para aktivis pro-syari'at Islam yang pada masa Orde Baru pernah dipenjara karena menolak asas tunggal Pancasila dan melanggar UU subversi, di antaranya Irfar S. Awwas vonis hukum 13 tahun, M. Shobbarin Syakur vonis 7,5 tahun, Harun vonis 5 tahun, Abu Bakar Ba'asyir, vonis 9 tahun (lari ke Malaysia). Setelah Orde lengser tahun 1998, UU itu dicabut, secara otomatis mereka itu bebas. Kemudian pada tahun 2000, mereka menggelar kongres Mujahidin di Yogyakarta, untuk menyatukan semua potensi penegakan syari'at Islam, pada kongres itu melahirkan piagam Yogyakarta.

Dalam membangun pola gerakan, secara tegas MMI tidak mau berkompromi dengan pihak yang tidak setuju dengan tegaknya syari'at Islam, bahkan kalangan non-muslim, muslim liberal termasuk juga kaum sekuler tidak dapat diterima sebagai pemimpin dan harus diperangi. Hal itu didasarkan pada cita-citanya yang ingin menerapkan syari'at Islam di lembaga negara (*daulah Islamiyah*) secara *kaffah (holistic)*.

Mengenai tuduhan tindak terorisme kepada (sebagian) aktivis MMI, sepertinya masih butuh penelusuran yang lebih jauh lagi, meski pola gerakannya adalah berjuang memerangi orang non-muslim (kafir) yang tidak mau tunduk kepada syari'at Islam. Dalam penelitian ini, diterangkan bahwa masalah terorisme yang menyebut MMI dan Ngruki sebagai jaringan al-Jama'ah al-Islamiyah (JI), adalah hasil dari publikasi dan laporan peneliti asing (*International Crisis Group*), yang masih membutuhkan kajian ulang atau banyak yang harus diklarifikasi atas beberapa tesisnya itu. Hasil penelitian ini men-display secara tematis tentang beberapa hal yang berhubungan dengan masalah kontroversi isu terorisme yang bersinggungan dengan MMI, Abu Bakar Ba'asyir dan Ngruki.

MMI menyatakan, bahwa musuh bagi tegaknya syari'at Islam adalah demokrasi, sekularisme, Islam liberal, non-muslim, Barat dan seterusnya. Untuk melawan semua itu, pihak MMI mengambil jalan konfrontasi, baik melalui pemikiran maupun fisik, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Mereka yakin jika syari'at Islam akan tegak di Indonesia, meski waktunya entah kapan?.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I: PENDAHULUAN	i
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Landasan Teori	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: MENGENAL MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA	20
A. Penelusuran Historis Kelahiran MMI	20
1. Penerapan Syari'at Islam di Indonesia	20
2. Proses Kelahiran Majelis Mujahidin Indonesia	28
a. Kondisi Umat Islam	31
b. Perintah dalam Agama (Dalil Agama)	38
c. Alasan Historis	41
B. Pedoman Umum Majelis Mujahidin Indonesia	43
C. Doktrin Teologis MMI	60
D. Tujuan Didirikan MMI	65

E. Profil Amir MMI (Abu Bakar Ba'asyir)	72
BAB III: MMI DALAM KONTROVERSI ISU TERORISME	85
A. Kontribusi Sidney Jones	87
B. Tentang ICG (<i>International Crisis Group</i>)	91
C. MMI dan Ngruki dalam Mapping ICG	94
D. Upaya MMI Melawan "Konspirasi" Isu Terorisme	101
E. Pandangan terhadap Non-Muslim	106
F. Interpretasi Jihad sebagai Konstruksi Sosial MMI	113
G. Penerapan syari'at Islam	122
BAB IV: PROBLEM PERJUANGAN MMI	130
A. Problem dalam Aksi Sosial MMI	130
B. Problem Penegakan Syari'at Islam	134
1. Pertentangan Internal Muslim	135
a. Islam Liberal	137
b. Sekularisme	150
2. Tantangan dari <i>Non-Muslim</i>	157
a. Orientalisme	158
b. Hegemoni Barat atas Negeri Muslim	165
C. Tawaran Alternatif	172
BAB V: PENUTUP	175
A. Kesimpulan	175
B. Saran-saran	177

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

CURICULUM VITAE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) sebenarnya adalah organisasi Islam yang usianya masih muda. Ia didirikan lima tahun yang lalu di Yogyakarta sebagai hasil pertemuan sejumlah aktivis muslim dari berbagai daerah di Indonesia dan beberapa delegasi dari luar negeri pada bulan Agustus 2000 yang disebut "Kongres Mujahidin". Tokoh kunci dari kongres Mujahidin adalah Irfan Suryahardi Awwas dan Abu Bakar Ba'asyir.¹ Peran Abu Bakar Ba'asyir dan Irfan Suryahardi Awwas di tubuh MMI sangat besar, terbukti dengan dipilihnya Abu Bakar Ba'asyir sebagai Amirul Mujahidin dan Irfan Suryahardi Awwas sebagai Ketua Dewan Tanfidziyah yang kemudian dipilih kembali pada kongres Mujahidin kedua pada bulan September 2003 di Solo.

Meskipun umurnya masih muda, pengurus MMI yang mengklaim bahwa kehadiran mereka telah dinantikan oleh umat Islam di Indonesia yang merindukan penerapan syariat Islam, dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang cukup cepat. Mereka berambisi untuk menjadi organisasi aliansi (*tansiq*) bagi organisasi, kelompok atau individual muslim yang mempunyai orientasi dan metode gerakan yang sama untuk memperjuangkan

¹ Ia pernah dituduh sebagai pimpinan spiritual al-Jamaah al-Islamiyah (JI), Jaringan al-Qaeda di Asia Tenggara, namun kemudian gagal dibuktikan oleh Pengadilan Indonesia. Lihat, Muhammad Iqbal Ahnaf, *MMI dan HTI; The Image of The Other*, dalam Buku *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopedia* (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004), hlm. 693.

penerapan syari'at Islam di Indonesia.² Tampak dari setiap gerakannya, mereka selalu mengkalim mewakili seluruh umat Islam di Indonesia, yang menginginkan penerapan syari'at Islam, karena umat Islam di Indonesia dianggapnya selama ini belum menjalankan sistem syari'at Islam yang juga merupakan implementasi dari UUD '45.

Gerakan Majelis Mujahidin Indonesia, seakan menjadi fenomena yang dinamik dan menarik. Banyak pihak yang menuduh beberapa aktivisnya terlibat dalam kegiatan *Violence Action* atas nama agama, bahkan dituduh mempunyai garis koordinasi dengan jaringan pelaku bom disejumlah wilayah Indonesia atau yang populer disebut organisasi Al-Jama'ah Al-Islamiyah (JI), jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara. Menyikapi fenomena gerakan MMI yang dianggap sebagai kelompok radikal ini, terdapat kekhawatiran yang tidak hanya berasal dari *non-muslim*, tetapi juga berasal dari kalangan muslim sendiri, terutama muslim yang liberal dan akomodasionis, mereka khawatir akan kekerasan yang potensial dilakukan oleh kelompok-kelompok muslim radikal dan efeknya terhadap citra Islam di mata dunia.³ Pada konteks gerakan sosialnya, MMI banyak mendapat sorotan negatif karena karakternya yang dianggap eksklusif dan radikal oleh beberapa kalangan.

Menurut MMI, syari'at Islam merupakan satu-satunya hukum yang cocok untuk manusia, karena diciptakan oleh Allah yang menciptakan

² *Tansiq* artinya bersifat aliansi, baik organisasi, kelompok atau individu muslim, atas dasar kesamaan *ukhuwah*, kesamaan akidah serta *manhaj* perjuangan, sehingga majelis ini dijadikan wadah untuk dakwah dan jihad menegakkan *dimullah* di muka bumi, tanpa dibatasi suku, bangsa ataupun negara. Tentang *tansiq*, lihat *Mengenal Majelis Mujahidin untuk Penegakan Syari'at Islam*, Markas Pusat Majelis Mujahidin, Karanglo Kotagede Yogyakarta.

³ Muhammad Iqbal Ahnaf, *MMI dan HTI; The Image of The Other*, hlm. 692.

manusia itu sendiri.⁴ Secara tegas MMI ingin meletakkan dasar agama yaitu syari'at Islam sebagai aturan yang harus dilakukan umat dan diterapkan pada undang-undang negara, sehingga pelaksanaannya mendapatkan perlindungan hukum.

Sejauh ini memang belum ada berita bahwa MMI melakukan tindakan kekerasan dalam pengertian menyerang kelompok (agama) lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Front Pembela Agama Islam (FPI) yang menyerang tempat-tempat maksiat yang menciptakan karakteristik gerakan penerapan syari'at Islam sebagai kelompok keras dan radikal. Tokoh-tokoh MMI selalu menangkis tuduhan bahwa gerakan mereka berwatak kekerasan. Menurut Irfan Suryahardi Awwas bahwa berperang melawan penghalang bagi tegaknya syari'at Islam harus dilakukan dengan cara yang imbang, serangan fisik harus dilawan dengan fisik, pemikiran dengan pemikiran, ideologi dengan ideologi dan politik dengan politik.⁵ Pola gerakan yang dibangun MMI menggunakan cara damai tanpa ada unsur kekerasan. Akan tetapi dinamika yang terjadi memunculkan banyak pertanyaan, mengapa MMI dianggap organisasi yang dekat dengan tindak kekerasan dan terorisme.⁶ Untuk menjawab semua itu, perlu ada penelitian yang mengurai dan memaparkan gerakan MMI di

⁴ Muhammad Iqbal, *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara Kerjasama dengan penerbit Misaka Galiza, 2004), hlm. 22.

⁵ Muhammad Iqbal Ahnaf, *MMI dan HTI; The Image of The Other*, hlm. 719.

⁶ Terorisme diartikan dengan; perbuatan kekerasan atau usaha menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman untuk mencapai tujuan tertentu (terutama politik). Lihat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 939.

Indonesia, sehingga benar dan tidaknya tuduhan yang ditujukan kepada MMI akan terungkap secara jelas.

Agenda penerapan syari'at Islam memberikan argumen diplomatis bagi MMI untuk menghindari tuduhan sebagai gerakan makar. Mereka bisa saja mengatakan bahwa agenda mereka bukanlah untuk mendirikan "Negara Islam", tetapi "Republik Indonesia" yang menerapkan syari'at Islam. Penerapan syari'at Islam menurut mereka adalah hak umat Islam di Indonesia karena mereka adalah mayoritas dan penerapan hukum Islam adalah bentuk praktik ibadah yang seharusnya dilindungi berdasarkan UUD '45 Pasal 29. Mereka beralasan bahwa pasal 29 dari UUD '45 juga mengizinkan umat beragama lain untuk menerapkan hukum agama mereka sebagaimana juga Islam.⁷

Kuatnya semangat gerakan pendukung penerapan syari'at Islam di Indonesia ternyata diikuti pula dengan kuatnya arus penolakan penerapan syari'at Islam yang dilakukan oleh organisasi massa Islam terbesar, seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan beberapa partai politik yang bercorak nasionalis.⁸ Pada kenyataannya, meski perjuangan MMI dalam mengusung syari'at Islam tidak sendirian, ada Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dalam politik praktis terdapat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan sebagainya, namun arus yang bertentangan dengan MMI merupakan kekuatan organisasi terbesar di Indonesia seperti tersebut di atas,

⁷ Sebagaimana tercantum dalam piagam Yogyakarta yang merupakan hasil dari kongres Mujahidin I, di Yogyakarta tahun 2000 M. Lihat *Mengenal Majelis Mujahidin*, hlm. 5.

⁸ Azhari Akmal Tarigan, "Penerapan Syari'at Islam di Indonesia dalam Perspektif Islam Liberal", dalam Muhammad Iqbal, *Penerapan Syari'at Islam*, hlm. 28.

sehingga gerakan yang dibangun akan mendapat perlawanan yang cukup kuat dari beberapa organisasi dan kelompok penentangannya. Dialektika yang berkembang menjadi tantangan tersendiri bagi aktivis MMI dalam berjuang menerapkan syari'at Islam di Indonesia. Meski ada arus lebih besar yang melawan, namun optimisme dan semangat para aktivis MMI tetap konsisten, bahkan mereka mengklaim bahwa keanggotaan organisasi semakin bertambah banyak. Hal ini membuktikan bahwa MMI semakin mendapat simpati dari masyarakat, apakah kehadirannya memang dinantikan oleh banyak kalangan yang menginginkan tegaknya syari'at Islam di Indonesia? Seperti yang telah diklaim oleh MMI sendiri.

Ditinjau dari kelahirannya, gerakan penerapan syari'at Islam di Indonesia memang merupakan reaksi terhadap krisis berganti-ganti dari berbagai ideologi dan merupakan gerakan yang mencoba menawarkan solusi berupa Islam sebagai sebuah ideologi alternatif. Cita-cita gerakan penerapan syari'at Islam membangun suatu sistem sosial-politik berdasarkan syari'at masih sulit diwujudkan, karena masih minimnya dukungan dari umat Islam sendiri.⁹ Melihat fenomena tersebut, tentunya akan menjadi pekerjaan berat bagi aktivis MMI yang berupaya mewujudkan cita-citanya menerapkan syari'at Islam di Indonesia.

Banyaknya kelompok di luar MMI yang bertentangan dengan ide dasar perjuangan MMI, pastinya akan menimbulkan banyak gejolak dalam konteks gerakan di lapangan. Tujuan pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia, oleh

⁹ Tim, *Tashwirul Afkar* (Jakarta: Lakspesdam dan TAF Edisi No. 13 tahun 2002), hlm 117.

beberapa kalangan sejak zaman kemerdekaan seakan belum menemukan titik temu. MMI menggambarkan bahwa kondisi umat Islam Indonesia sebagai mayoritas *dzimmi* karena hak mereka untuk melakukan hukum Islam dihalang-halangi oleh minoritas *non-muslim*. Menurut Abu Bakar Ba'asyir, penolakan untuk memasukkan piagam Jakarta ke dalam UUD '45 yang mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam, merupakan upaya "pemurtadan kolektif".¹⁰

Melihat fenomena yang ada, bahwa gerakan MMI selalu dicurigai sebagai model gerakan yang tidak humanis oleh banyak pihak termasuk pemerintah, banyaknya aktivis MMI yang sering berurusan dengan pihak keamanan Indonesia, terutama Datasemen 88 Antiteror Polri, seakan menjadi bukti, bahwa MMI dianggap sebagai organisasi yang dekat dengan tindak kekerasan dan terorisme. Untuk mencari kebenaran dari semua itu, perlu dibuktikan dengan mengungkap fakta yang terjadi. Dari sinilah pentingnya melakukan penelitian atas kronologi gerakan MMI secara utuh, agar dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya, sehingga tidak ada lagi vonis yang tanpa didasarkan tanpa bukti.

Sejak kelahirannya, MMI telah banyak menorehkan kiprah gerakan di Indonesia, baik fisik maupun pemikiran dalam rangka penegakan syari'at Islam. Terlepas dari kecurigaan yang terjadi oleh beberapa pihak termasuk

¹⁰ Yang dimaksud "pemurtadan kolektif" yaitu, adanya kekuatan yang menghalangi tegaknya syari'at Islam di Indonesia, padahal mayoritas penduduknya adalah muslim yang mempunyai kewajiban menjalankan syari'at Islam itu, maka jika ada aturan hukum dibuat tidak menggunakan dasar syari'at Islam termasuk penolakan terhadap pemberlakuan "piagam Jakarta", dianggap sebagai upaya pemurtadan kolektif. Lihat, Abu Bakar Ba'asyir, "Pidato Amanah Amirul Mujahidin", dibacakan pada Kongres Mujahidin II, di Solo, 2003, hlm. 5.

pemerintah, MMI merupakan salah satu organisasi yang paling menjadi perhatian oleh banyak kalangan, bahkan dunia internasional terutama Barat, yang menganggapnya sebagai salah satu kekuatan yang berbahaya dan perlu diwaspadai.

Berangkat dari permasalahan di atas, melakukan penelitian terhadap dinamika gerakan MMI. Merupakan sesuatu yang menarik dan aktual bagi dunia akademik maupun pergerakan. Dimulai dari penelusuran historis gerakan penerapan syari'at Islam di Indonesia, proses berdiri organisasi, pola dan dinamika gerakan, masalah isu terorisme, yang dihubungkan dengan MMI, sampai pada hal-hal yang menjadi problem dari gerakan dan bagaimana solusi alternatifnya.

B. Batasan dan Rumusan Masalah.

Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah gerakan MMI, sebagai unsur dinamika keagamaan di Indonesia. Gerakan MMI merupakan salah satu bentuk karakter gerakan Islam di Indonesia yang fenomenal, karena model perjuangannya yang lugas, beberapa aktivisnya selalu dicurigai oleh beberapa kelompok lain termasuk pemerintah, dengan tuduhan sebagai orang yang menggunakan cara kekerasan dalam mewujudkan cita-citanya.

Penelitian ini akan mengungkap peristiwa dan dinamika gerakan yang telah dilakukan oleh MMI dari tahun 2000 sampai 2005, sehingga akan tersaji suatu pemaparan peristiwa secara utuh berdasarkan fakta menurut data yang ada. Dari sini diharapkan bisa menjadi pembuktian, tentang kebenaran atas

segala sesuatu yang menyangkut gerakan MMI berdasarkan kaedah ilmiah, tindakan mencurigai MMI telah menemukan kebenaran dan relevan, atau justru merupakan konspirasi yang bisa merugikan masyarakat dan negara Indonesia.

Berangkat dari permasalahan di atas, rumusan atau pokok masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi MMI lahir dan siapa tokoh pendirinya?
2. Bagaimana fakta gerakan MMI dalam kontroversi isu terorisme?
3. Apa yang menjadi problem perjuangan MMI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Berangkat dari rumusan di atas, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang lahir dan tokoh pendiri MMI.
2. Untuk mengetahui fakta gerakan MMI dalam kontroversi isu terorisme.
3. Untuk mengetahui problem perjuangan MMI.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang gerakan penerapan syari'at Islam di Indonesia. Kegunaan yang demikian dapat dikatakan: untuk menambah wawasan tentang gerakan penegakan syari'at Islam, memberi kontribusi pemikiran bagi pengembangan gerakan keagamaan untuk dijadikan bahan acuan, pertimbangan, komparasi demi kemajuan Islam, juga untuk memperkaya khazanah intelektual, terutama dalam pemahaman gerakan keagamaan dan politik Islam.

D. Tinjauan Pustaka.

Pembahasan masalah gerakan untuk penerapan syari'at Islam sangat erat kaitannya dengan diskursus gerakan sosial politik sebagian umat Islam. Agus Maftuh Abegebriel dalam bukunya *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopedia*, diterbitkan oleh SR-Ins Publising, Yogyakarta tahun 2004, memuat beberapa tulisan ilmiah yang membahas tentang gerakan sosial politik Islam dan negara, di dalamnya terdapat tulisan yang secara spesifik mengulas tentang pola dan karakter Majelis Mujahidin Indonesia dengan tema *MMI dan HTI; The Image of The Other* ditulis oleh Muhammad Iqbal Ahnaf, ia memaparkan tentang pola gerakan dan pandangan MMI serta HTI terhadap kelompok di luar mereka, kedua organisasi ini dalam tulisannya Iqbal dianggap mempunyai karakter *antagonistik* dan gerakan tertekan (terutama oleh Barat), karena Barat selama ini dianggap banyak membuat umat muslim diberbagai belahan dunia menderita, sehingga melihat Barat dan *non-muslim* sebagai kelompok musuh yang harus diperangi secara proporsional. Dari situ terdapat perbedaan pembahasan yang akan ditulis dalam skripsi ini, karena materi dalam skripsi ini adalah sejarah, dan dinamika gerakan MMI, sedangkan Iqbal banyak mengulas masalah materi, pola dan karakter gerakan MMI dan HTI.

Buku tersebut, juga mengulas tentang *Islam dan Negara dengan multi perspektif*. Tema yang disampaikan penuh dengan temuan yang (dianggap) spektakuler bagi dunia akademik, di dalamnya juga menyajikan cukup banyak data dalam bentuk naskah (katanya) rahasia, di antaranya *Pedoman*

Mengamalkan Islam Menurut al-Qur'an dan as-Sunah (PMIMADA) karya Abu Bakar Ba'asyir yang tidak diterbitkan secara umum, *Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah al-Islamiyah* (PUPJI) yang di dalamnya memuat Nidzom Asasi Al-Jama'ah Al-Islamiyah atau semacam UUD '45, dan beberapa dokumen tentang aktivis Al-Jama'ah Al-Islamiyah yang lain, bahkan pada bagian akhir buku ini, Maftuh seakan bisa membuktikan bahwa Al-Jama'ah Al-Islamiyah itu ada, berwujud dan bisa disentuh, dengan cara mengotak atik beberapa dokumen dari JI dan MMI. Adapun sebagian dari dokumen itu dilampirkan pada bagian paling akhir bukunya, dalam masalah keberadaan JI, pihak MMI tidak pernah mengakui keberadaan Al-Jama'ah Al-Islamiyah (JI) itu, apalagi dihubungkan dengan aktivitasnya. Menurut Maftuh, JI bisa saja mempunyai hubungan dengan MMI, karena di antara keduanya itu mempunyai tujuan yang sama yaitu mendirikan Negara Islam di Asia Tenggara, meski karyanya itu masih banyak kelemahan akademik, namun temuannya cukup bisa dianggap rasional. Perbedaan dengan penelitian ini adalah, jika Maftuh membuat kesimpulan tentang JI itu ada dan MMI dianggap mempunyai hubungan dengan JI, maka penelitian ini secara tegas tidak akan masuk pada materi perdebatan tentang JI. Namun terfokus pada sejarah dan dinamika gerakan MMI.

Buku selanjutnya yang membahas MMI adalah, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, yang disunting oleh Jauhari dan Jajang Jahroni, diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada Jakarta tahun 2004, memuat tulisan yang membahas tentang MMI, tepatnya terdapat pada bagian ketiga. Dalam tulisan

itu diterangkan tentang gambaran umum organisasi, sekilas perjuangan Ea'asyir, pondok Ngruki sebagai basis radikalisme, agenda *tahbiqus syari'ah*, kaderisasi, doktrin organisasi, jaringan dan pendanaan serta model gerakan. Buku ini dapat dikatakan hanya membahas tentang selubung internal dan pola gerakan MMI.

Dalam buku tersebut, mengulas beberapa hal yang mempunyai kaitan dengan gerakan MMI, dimulai dari *setting* kronologi sejarah penerapan syari'at Islam di Indonesia sampai pada materi organisasi dan gerakan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada materinya, karena dalam penelitian ini terdapat pembahasan tentang masalah isu terorisme dan problem perjuangan MMI, sehingga materi kajian ini bisa dikatakan lebih detail dan lengkap, karena memasukkan masalah yang membuat MMI menjadi organisasi yang paling disorot oleh banyak kalangan terkait dengan dugaan terlibat dalam Al-Jama'ah Al-Islamiyah Jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara.

Irfan S. Awwas dalam bukunya *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, diterbitkan oleh Wihdah Press, Yogyakarta tahun 2003, di dalamnya memuat tentang beberapa seruan Abu Bakar Ba'asyir terhadap para tokoh berpengaruh dunia seperti George W. Bush, Saddam Husein, termasuk presiden Megawati saat itu, untuk menerapkan sistem syari'at Islam dalam bentuk surat dan usulan *draf* alternatif yang dikonsep oleh Abu Bakar Ba'asyir. Buku ini menjadi bukti bahwa tugas dalam menyerukan syari'at Islam telah diupayakan dengan berbagai cara termasuk memberikan masukan terhadap para tokoh besar dunia yang berpengaruh. Secara umum, buku ini dapat diartikan sebagai

salah satu karya yang berisi tentang usulan MMI kepada beberapa tokoh untuk menerapkan syari'at Islam diberbagai belahan dunia.

Dalam buku yang di edit oleh Irfan S. Awwas itu, Abu Bakar Ba'asyir (*Amirul Mujahidin*) secara tegas menyatakan bahwa Islam wajib diamalkan dalam lembaga negara. Artinya, menurut Abu Bakar Ba'asyir syari'at Islam yang akan ditegakkan oleh Majelis Mujahidin adalah syari'at Islam yang dijadikan dasar pemerintahan dan hukum negara, yaitu dengan cara mendirikan Negara Agama atau *Daulah Islamiyah*, dalam buku itu memuat tentang beberapa upaya gerakan MMI secara metodologis dalam menegakkan syari'at Islam.

Buku selanjutnya, *Kewajiban Menerapkan Syari'ah Islam*, karya Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz diterbitkan oleh Wihdah Press Yogyakarta tahun 2003, berisi tentang dasar teologis bagi umat untuk wajib menjalankan syari'at Islam berdasarkan al-Qur'an dan al-hadis, buku tersebut diyakini oleh aktivis MMI sebagai landasan dalam memperjuangkan syari'at Islam. Secara umum buku itu merupakan materi doktrin MMI untuk melaksanakan penegakan syari'at Islam, buku tersebut memuat doktrin MMI yang disusun dengan mengutip beberapa ayat al-Qur'an dan al-hadis.

Dari beberapa literatur yang telah dikemukakan di atas, setelah dilakukan pelacakan sementara, pembahasan tentang gerakan MMI dalam isu terorisme dan problem perjuangannya belum ada yang membahas. Dengan sendirinya kajian dalam penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

E. Landasan Teori.

Gerakan perjuangan penerapan syariat Islam di Indonesia, telah menciptakan struktur masyarakat yang mempunyai karakter tersendiri. Dari sudut pandang tersebut, sejarah gerakan suatu kelompok sosial dapat dikaji bukan saja bermula dari proses internalnya, melainkan juga dihadapkan pada kenyataan struktural atau kejadian yang terjadi di lapangan.¹¹ Dalam konteks ini, tentunya objek yang dikaji bukan hanya dari proses yang terjadi dalam internalnya saja, namun juga mengkaji dari beberapa peristiwa yang diakibatkan dari proses eksternal, maksudnya adalah peristiwa yang diteliti tidak hanya peristiwa yang terjadi akibat dari gerakan yang direncanakan, namun juga peristiwa yang muncul dari luar gerakan MMI, sehingga memberikan pengaruh terhadap proses gerakan dan hasilnya.

Perbedaan pandangan keagamaan sering kali menimbulkan gejolak di masyarakat, perpecahan bisa timbul manakala terjadi penolakan terhadap pandangan hidup lama. Perpecahan itu timbul disebabkan oleh klaim (kelompok) agama akan kemutlakan agamanya, dan sering diekspresikan dalam bentuk-bentuk yang keras dan tanpa kompromi.¹² Dalam realita gerakan MMI yang tegas tanpa kompromi, ditambah adanya perbedaan pandangan keagamaan dan politik, dengan beberapa kelompok Islam sendiri maupun (kelompok) agama lain, hal itu tentunya dapat memicu munculnya perpecahan

¹¹ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Tiara Wacana Ilmu, 1999), hlm. 20.

¹² M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 288.

dan pergolakan antar (kelompok) agama yang disebabkan oleh berbagai perbedaan-perbedaan yang tidak mampu didialogkan secara baik oleh para pendukungnya.

Gerakan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu usaha atau kegiatan terencana yang dilakukan oleh organisasi keagamaan, sebagai upaya untuk mengembangkan organisasi dan dalam rangka mewujudkan cita-cita organisasi.¹³ Penelitian ini akan terfokus pada aktivitas gerakan yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin Indonesia, dalam bentuk dinamika dari manifestasi gerakan keagamaan dan sosial politik, sebagai upaya untuk menerapkan syari'at Islam di Indonesia.

Sebagaimana telah diketahui, gerakan penerapan syari'at Islam di Indonesia akhir-akhir ini meningkat dan menarik perhatian oleh banyak kalangan. Karena terjadinya beberapa peristiwa yang berhubungan dengan aktivis Majelis Mujahidin Indonesia, itu semua tidak dapat terlepas dari pola gerakannya yang seringkali dianggap fundamentalis, dan banyak dicurigai sebagai kekuatan berbahaya terlibat dalam Al-Jama'ah Al-Islamiyah, Jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara, dalam pengertian terkait tindak kekerasan dan terorisme.¹⁴

¹³ W.JS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 961.

¹⁴ Kata *fundamentalis* adalah kata sifat yang memberikan pengertian "bersifat dasar" (pokok); mendasar, "diambil dari kata *fundament* yang berarti "dasar, asas, alas, fondasi". Dengan demikian Fundamentalisme dapat diartikan dengan faham yang berusaha untuk memperjuangkan atau menerapkan apa yang dianggap mendasar. Lihat *Ibid.*, hlm. 245.

MMI diusianya yang tergolong masih muda, termasuk mengalami kemajuan yang cukup pesat, kehadirannya banyak memberi warna dalam kanvas dinamika gerakan keagamaan maupun sosial politik (terutama dalam hal penegakan syari'at Islam) di Indonesia, sangat tepat jika diteliti dengan konsep gerakan sosial dan dianalisa dengan teori agama dan masyarakat. Yang dimaksud dengan gerakan sosial adalah suatu gerakan yang berkembang secara teratur, mempunyai tujuan dan kompleks.¹⁵ Sedangkan teori agama dan masyarakat yaitu, membicarakan peranan agama dalam kehidupan mencakup dua hal yang berhubungan erat, memiliki aspek-aspek yang terpelihara, pengaruh dari cita-cita agama dan etika agama dalam kehidupan individu maupun kelompok.¹⁶

Teori agama dan masyarakat yang dimaksud adalah suatu teori yang akan digunakan sebagai alat analisa serta meneliti gerakan Majelis Mujahidin Indonesia, yang mana dalam gerakan itu terdapat dua unsur utama yaitu agama (syari'at Islam) sebagai wujud cita-cita dan landasan perjuangannya, sedangkan masyarakat sebagai objek dan pelakunya sehingga secara langsung maupun tidak, akan memberi pengaruh bagi terjadinya perubahan struktur sosial dalam pola keagamaan yang ada di masyarakat.

F. Metode Penelitian dan Pembahasan.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang ingin menghasilkan bentuk dan proses pengkisahan atas peristiwa- peristiwa manusia yang telah

¹⁵ Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial* (Jakarta: YOI, 2001), hlm. 19.

¹⁶ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar; Teori dan*, hlm. 227.

terjadi di masa lampau.¹⁷ Untuk menghasilkan keutuhan-keutuhan masa lampau, dalam hal ini akan digunakan metode sejarah, yaitu seperangkat asas atau kaidah yang sistematis untuk membantu secara efektif dalam menyimpulkan sumber dan data, kemudian menilainya secara kritis dan menyajikan suatu sintesa hasil yang diurai.¹⁸

Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah:

1. *Heuristik*, yaitu tahap mencari data dari beberapa sumber, adapun cara yang digunakan adalah:
 - a. Tahap pendahuluan, pada mulanya sebelum masuk pada pencarian dan pengumpulan sumber penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan diskusi atau dialog dengan beberapa pihak yang mempunyai *consent* dan atau telah melakukan kajian tentang MMI. Di samping itu, juga aktif mengamati beberapa media cetak (Koran dan majalah) dan elektronik (televisi dan internet) yang memuat informasi berkaitan dengan objek penelitian.
 - b. Wawancara dengan beberapa sumber utama dalam objek penelitian, dalam hal ini adalah para pengurus pusat Majelis Mujahidin Indonesia dan beberapa orang yang terlibat atau bersinggungan dengan gerakan MMI. Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua cara, yaitu dilakukan dengan cara formal dan *non-formal*. Cara formal ditempuh dengan prosedural atau melalui perizinan, sedangkan *non-formal* dilakukan

¹⁷ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian*, hlm. 5.

¹⁸ Louis Gotschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI-Press, 1992), hlm. 32. Lihat juga Nugroho Noto Susanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta: Intiidayu Press, 1984), hlm. 11.

- dengan wawancara rahasia, pribadi atau tanpa sepengetahuan nara sumber.
- c. Meneliti sumber-sumber tertulis, misalnya; dokumentasi dan arsip yang ada di kantor Markaz Pusat Majelis Mujahidin Indonesia, buku, Koran, jurnal, majalah dan larya lain yang membahas dan berhubungan dengan objek penelitian serta memungkinkan untuk dijadikan sumber.¹⁹ Dalam hal ini, bisa berupa *draf*, makalah, naskah dan sebagainya.
 - d. Meneliti sumber-sumber yang berbentuk rekaman (*recording cassette*), berupa pidato atau ceramah dari para tokoh MMI. Sumber ini, bisa berupa rekaman yang diedarkan oleh perusahaan rekaman resmi maupun melakukan sendiri.
2. Kritik atau Verivikasi, yaitu tahap menguji keabsahan dan mengujinya dengan kritik sumber baik *intern* maupun *ekstern*. Langkah ini antara lain dengan cara membandingkan data yang diperoleh antara satu dengan yang lain, sehingga diperoleh data yang *credible* dan otentik. Dalam hal ini, apabila terdapat beberapa sumber yang mempunyai kesamaan materi, maka akan dilakukan penyeleksian untuk memilih data yang paling layak untuk dijadikan bahan penelitian.
3. Interpretasi atau penafsiran serir.gkali disebut sebagai biang subjektivitas. Sebagian itu benar, tetapi sebagian yang lain salah,²⁰ bisa juga disebut

¹⁹ Louis Gotschalk, *Mengerti*, hlm. 35-37.

²⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), hlm. 102-103.

dengan analisis sejarah. Analisis sejarah sendiri bertujuan untuk melakukan *sintesis* atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersamaan dengan teori, disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang *holistic* (menyeluruh).²¹

4. *Historiografi*, yaitu tahap menyajikan hasil sintesa dari data yang telah diolah ke dalam bentuk penulisan atau untuk dijadikan dalam bentuk penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian yang telah dilakukan.²² Dalam tahap ini, dapat diartikan sebagai langkah penyusunan atau pemaparan kembali fakta-fakta sejarah yang diperoleh, menjadi kesatuan yang utuh, dalam hal ini, bisa disebut pengelompokan kronologis tematis ke dalam bentuk gambaran, pengertian dan pemahaman.

G. Sistematika Pembahasan.

Skripsi ini terbagi atas lima bab, yang masing-masing bab saling berkaitan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Vol. I (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 3.

²² Nugroho Noto Susanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* (Jakarta: Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata, 1964), hlm. 22-29. Lihat juga Ignés Kleden, *Sikap Ilmian dan Kritik Kebudayaan* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. xii.

Bab kedua membahas tentang penelusuran historis gerakan penegakan syari'at Islam di Indonesia, kemudian proses lahirnya organisasi Majelis Mujahidin Indonesia dilanjutkan dengan pemaparan profil, doktrin, pedoman umum, tujuan organisasi, dan tokoh kunci yang memprakarsai berdirinya MMI.

Bab ketiga memaparkan tentang masalah kontroversi isu terorisme yang dihubungkan dengan MMI, pandangan MMI terhadap orang *non-muslim*, konsep jihad dalam konstruk sosial-politik dan keagamaan atau gerakan yang dilakukan MMI akan disajikan, dilanjutkan dengan pemaparan masalah penerapan syari'at Islam.

Bab keempat membahas tentang beberapa problem perjuangan yang dialami MMI, di antaranya adalah aksi sosial, beberapa faktor yang datang dari internal Islam maupun eksternal, dilanjutkan dengan penawaran solusi alternatif bagi upaya penegakan syari'at di Indonesia.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PROBLEM PERJUANGAN MMI

A. Problem dalam Aksi.

Sebagai organisasi keagamaan yang mempunyai cita-cita menyelamatkan bangsa Indonesia dengan syariat Islam, MMI secara logis pasti ikut serta dalam berbagai proses sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Beberapa aksi sosial telah dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah, salah satunya di Aceh paska gempa bumi dan tsunami beberapa waktu yang lalu.

Pada kenyataannya, ketika melakukan kerja sosial untuk membantu para korban musibah, MMI menyatakan jika aktifitasnya murni didasarkan untuk kemanusiaan, namun yang terjadi di lapangan, para relawan MMI mengalami beberapa kendala, bahkan terjadi pengusiran dari posko yang didirikan. Hal itu tentunya tidak dapat dianggap sebagai peristiwa yang sederhana, namun lebih pada nuansa *sentiment* dari beberapa kelompok atas keberadaan relawan MMI, yang dianggap mempunyai motivasi kekuatan berbahaya.

Seperti yang diberitakan, sebanyak delapan orang anggota Laskar Majelis Mujahidin Indonesia dipulangkan paksa oleh TNI AU dari posko bantuan korban bantuan di Lapangan Udara (Lanud) Sultan Iskandar Muda Nangroe Aceh Darussalam (NAD), pada Minggu tanggal 19 Januari 2005. Menurut juru bicara MMI pusat Fauzan al-Anshori, Majelis

Mujahidin merasa ada pihak-pihak yang tidak suka dengan keberadaan mereka di Nangroe Aceh Darussalam. “Kami sangat tersinggung dan merasa difitnah, karena kami tidak mendapat penjelasan apapun dari pihak TNI, “Ungkap Fauzan al-Anshori.¹

Fauzan al-Anshori menuding, militer bantuan Australia dan Amerika Serikat, kemungkinan yang tidak suka dengan keberadaan Laskar Mujahidin berada di posko Sultan Iskandar Muda. “Tentara AS dan Australia risau dengan Laskar Mujahidin yang bertenda di lokasi yang strategis di posko Lanud, “Fauzan menyatakan, keberadaan Laskar Mujahidin di Aceh mulai dipersoalkan, ketika pemberitaan disebuah situs berita luar negeri. Artikel tersebut menyatakan akan adanya potensi bahaya baru yang muncul dari sebuah kelompok Islam radikal yang terkait dengan al-Qaeda yang sekarang berada di Aceh khususnya terhadap tim militer AS dan Australia.²

Menurut Fauzan al-Anshori, kejadiannya berawal pada Minggu 09 Januari 2005, ketika Panglima TNI Jenderal Endriantono Sutarto datang meninjau kondisi Lanud Sultan Iskandar Muda. “Sore harinya, selepas maghrib tenda kami didatangi pasukan TNI AU (datang dengan tiga truk) yang meminta Laskar kami dalam 30 menit untuk mengemasi barang dan segera pulang ke Halim dengan pesawat Hercules yang sudah disiapkan, “Ujar Fauzan, yang mendapat informasi dari Ustadz Salman, koordinator

¹ <http://tempointeraktif.com/lg/nasional/2005/01/10/brk,20050110-63,id.html>.

² *Ibid.*

relawan MMI di Aceh. Menurut Fauzan al-Anshori, kalau MMI mengganggu di posko Lanud, kenapa tidak dipindahkan saja ke posko lain, tapi malah dipulangkan. Kedelapan relawan Laskar Mujahidin tersebut adalah relawan pimpinan Ustadz Salman dari Solo yang berangkat ke Aceh pada gelombang II dari Lanud Halim Perdana Kusuma pada 1 Januari 2005.³

Memang saat itu sempat beredar kabar jika MMI mempunyai potensi untuk kerjasama dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Irfan Suryahardi Awwas membantah bahwa kerjasama MMI dengan GAM sebagai alasan pengusiran tim relawannya di Nangroe Aceh Darussalam.

Irfan memaparkan, MMI mengirim tim relawan ke NAD atas dasar kemanusiaan yang dibingkai oleh syariat Islam. Melihat korban tewas yang lebih dari 100.000 orang, MMI merasa perlu membantu paling tidak mengevakuasi, memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan mayat-mayat tersebut. “hanya sebatas itu, kalau urusan GAM itu urusan politik dengan pemerintah, MMI tidak ikut campur, “ujarnya dalam dialog di radio Tri Jaya FM. Irfan menduga pengusiran Tim Relawan MMI dari Aceh lantaran TNI ditekan oleh pasukan Asing, terutama AS dan Australia karena di lapangan Tim Relawan MMI malah

³ *Ibid.*

bekeja sama dengan pasukan asing seperti dari Jepang, Korea, Singapura dan Malaysia.⁴

Berangkat dari pemaparan di atas, dari pihak relawan MMI yang dipimpin oleh Haikal, membantah relawannya diusir oleh pihak TNI, terkait kepindahannya dari Lanud Iskandar Muda. Koordinator relawan MMI di Aceh, Haikal mengatakan, sempat beredar isu MMI diusir dari Aceh oleh pihak TNI. Namun berita tersebut menurutnya tidak benar. "Dalam hal ini saya berbicara atas nama MMI, "itu hanya isu saja," kata Haikal. Menurutnya, selama beberapa hari, mereka mendirikan posko di Lanud Iskandar Muda, Aceh Besar, namun pihak TNI melarang para relawan sipil berada di wilayah pangkalan milik TNI AU itu. Kemudian MMI diperintahkan untuk pindah dari sana. "jadi kami tidak diusir, tetapi hanya diminta untuk mencari lokasi lain di luar Lanud," katanya. Setelah itu, MMI yang membawa sekitar 60 orang relawan akhirnya memindahkan posko mereka di Desa Bong Bangjok, Blang Bintang yang tidak jauh dari Lanud dan di kawasan Lamreung, Darussalam.⁵

Terlepas dari kebenaran berita tersebut, menurut penulis, dari realita di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa MMI sebagai organisasi juga melakukan tindakan sosial untuk membantu para korban musibah, salah satunya di Aceh paska gempa bumi dan tsunami. Meskipun MMI secara

⁴http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=477&_schema=PORTAL30&pared_id=340837&patop_id=W20.

⁵ <http://acehupdate.degromist.nl/archives/001475.php>.

tegas menyatakan jika keberadaan relawannya di Aceh murni karena kemanusiaan, namun opini dan tindakan kelompok lain yang tidak senang terhadap MMI, dapat menjadikan suasana tegang. Hal ini membuktikan bahwa apapun yang dilakukan MMI, meski itu adalah untuk kemanusiaan, selalu mendapat sorotan dan tanggapan ekstra oleh beberapa pihak yang selama ini bersebrangan dengan visi dan misinya.

Mencermati posisi MMI, memang sering dikaitkan dengan pola gerakan al-Jama'ah al-Islamiyah, jaringan al-Qaeda di Asia tenggara, mungkin dengan alasan ini, MMI selalu mendapat pengawalan yang ekstra ketat dari beberapa pihak, termasuk kepentingan AS dan sekutunya, yang selama ini menyatakan perang terhadap al-Qaeda, karena dianggap sebagai organisasi teroris internasional yang membahayakan dunia.

B. Problem Penegakan Syari'at Islam.

Dalam membangun penegakan syari'at Islam, MMI sebagai organisasi yang mengklaim mewakili umat Islam seluruh Indonesia dan bersifat aliansi (*tamsiq*), tentunya banyak mengalami benturan. Pertarungan antara kelompok yang ingin memberlakukan syari'at Islam dan penentangnya, menjadi dinamika politik dan sosial keagamaan yang terus bergulir tiada henti, pro-kontra yang ada membawa permasalahan ini kepada pertentangan multi-disipliner, dari pertentangan ideologi sampai sistem sosial agama yang muaranya adalah antara setuju dan tidak setuju dengan pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia.

Selanjutnya, penulis akan memberikan uraian tentang beberapa hal menyangkut penentang pemberlakuan syari'at Islam, baik yang berasal dari orang Islam sendiri maupun dari pihak *non-muslim*. Dari pertentangan itu, kemudian dianalisa menggunakan komparasi pendapat dari beberapa kalangan, termasuk para tokoh MMI dan para penentangya, dengan didasarkan pada konteks kekinian dan keindonesiaan.

1. Pertentangan *Internal Muslim*.

Seperti yang telah menjadi sifat dari Majelis Mujahidin Indonesia yaitu *tansiq* (aliansi), yaitu bagi setiap kelompok maupun individu yang mempunyai kesamaan akidah, *ukhuwah* dan *al-manhaj* perjuangan, untuk melakukan dakwah serta jihad, dalam rangka tegaknya syari'at Islam. Pada kenyataannya, banyak pihak dari kelompok maupun individu muslim yang tidak sepakat dengan formalisasi syari'at Islam di Indonesia, dari sini terjadi pertentangan yang berasal dari *internal muslim* sendiri, seperti kalangan sekuler, liberal dan lain-lain. Seperti yang diakui oleh pihak MMI sendiri, Irfan S. Awwas mengatakan:

“Salah satu faktor penghalang tegaknya syari'at Islam adalah berasal dari kalangan muslim sendiri, bahkan banyak organisasi yang mengatasnamakan Islam tidak mau berjuang untuk menerapkan syari'at Islam, apalagi mereka yang kafir”.⁶

Seperti yang disampaikan oleh K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menurutnya di Indonesia, pada masa mendatang ada tiga

⁶ Wawancara dengan Irfan S. Awwas, 18 Mei 2006, di Markaz Pusat MM.

kelompok yang akan bertarung, antara lain *silent majority*, yang di dalamnya adalah rakyat kebanyakan yang tidak mau pusing dengan bentuk negara tetapi setia pada Pancasila dan UUD 1945. Kelompok kedua adalah yang mencari simpati dari dunia Barat. Dan yang ketiga adalah kelompok yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara. Gus Dur menambahkan bahwa NU dengan tegas menentang kelompok ketiga ini.⁷

Pendapat Gus Dur tersebut, jelas menjadikan MMI merasa ditentang terkait dengan cita-citanya untuk menegakkan syari'at Islam dengan cara menjadikar Indonesia sebagai negara Islam. Hal ini mengingat bahwa Gus Dur merupakan tokoh dari ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU. Menurut kalangan liberal, pendirian negara Islam bukanlah kewajiban agama, karena tidak ada nash yang mengindikasikan dengan jelas. Praktek Nabi pun tidak ada yang dengan tegas memerintahkan umat Islam untuk mewujudkan negara Islam atau pemerintahan syari'at Islam. Oleh karena itu, sah-sah saja jika umat Islam mendukung negara-bangsa dan ideologi nasionalismenya. Bahkan ada indikasi jika dalam sistem negara Islam menjadikan warga *non-muslim* ada posisi warga negara kelas dua.⁸

⁷ *Republika*, 22 September 1998, hlm 2 kolom 5. lihat juga Irfan S. Awwas, *Sepuluh Musuh Cita-cita Menuju Indonesia Baru Berlandaskan Islam* (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), hlm. 67.

⁸ David Sagiv, *Islam dan Otentitas Liberalisme* (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. V.

Lebih lanjut, tulisan ini akan mencoba menguraikan beberapa kelompok dari muslim maupun *non-muslim* yang tidak sepakat serta menghalangi cita-cita formalisasi syari'at Islam atau penegakan syari'at Islam, seperti yang menjadi cita-cita dari gerakan dan perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia. Tentunya dengan keberadaan kelompok ini, wacana dan dinamika gerakan Islam mengalami pertentangan yang multi-disipliner.

Islam liberal adalah salah satu aliran dari kelompok muslim yang ideologinya bersebrangan dengan MMI. Dalam konteks Indonesia, perkembangan wacana Islam liberal dalam lima tahun terakhir semakin memperoleh tempat. Meskipun merasa baru, kalangan liberal mengklaim jika Islam liberal adalah *the new wine in the old bottle*. Sosok yang disebut Islam Liberal telah memiliki sejarah panjang. Menurut Charlez Kurzman, lin2 berakar pada Syah Waliyuyllah (1703-1762) di India, dan muncul di antara gerakan-gerakan pemurnian Islam ala Wahabi pada abad ke-18. Bersamaan dengan munculnya Islam liberal, muncul pula tokoh-tokohnya di setiap zaman. Mereka antara lain: Jamaluddin al-Afghani di Afghanistan, Sayyid Ahmad Khan di India, dan Muhammad Abduh di Mesir. Ketiganya hidup pada abad ke-19.

Sementara itu, pada abad ke-20 terdapat antara lain: Abdullah Ahmed an-Naim, Mohammad Arkoun, Fazlur Rahman dan Fatimah Mernisi. Dalam konteks Indonesia terdapat Nurcholish Madjid,

pendekian Indonesia yang mengibarkan teologi inklusif.⁹ Dengan demikian, munculnya fenomena beberapa kelompok yang dianggap Islam liberal, telah memiliki akar yang sudah ada sejak lama dan berkembang sesuai dengan mekanismenya sendiri, seperti di Indonesia terdapat kelompok yang menamakan dirinya dengan sebutan Jaringan Islam Liberal (JIL). Ulil Abshar Abdalla bertindak sebagai koordinatornya atau dikenal juga dengan sebutan Komunitas Utan Kayu, karena bermarkas di kawasan Utan Kayu Jakarta.

Islam liberal antara lain bermakna pembebasan dari cara berpikir dan berperilaku keberagamaan yang menghambat kemajuan. Islam liberal tidak bisa dipertentangkan dengan Islam model lama seperti Islam tradisional, revivalis, atau modernis, juga model baru seperti *neo-modernis* dan *post-modernis*. Sebab, gagasan Islam liberal sesungguhnya kombinasi unsur-unsur liberal yang ada dalam kelompok-kelompok pemikiran modern itu. Adapun hal yang prinsip misalnya negara demokrasi, emansipasi wanita, dan kekerasan berpikir. Islam liberal lebih bisa menerima bentuk negara sekuler yang dipandang lebih unggul dari bentuk negara ala kaum fundamentalis.¹⁰

Dengan demikian, bahwa apa yang menjadi pola dari Islam liberal, banyak yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi dasar

⁹ Zakiyuddin Baidhawiy, *Ambivalensi Agama dan Konflik Nirkekerasan* (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. 221.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 221-222.

teologis dan perjuangan MMI. Salah satu contoh, jika Islam liberal sepakat dengan bentuk negara sekuler, maka sebaliknya MMI secara tegas menolaknya dan tetap memperjuangkan tegaknya syari'at Islam pada lembaga negara, seperti yang telah dibahas pada bab dua bagian atas dari tulisan ini.¹¹

H. Luthfi Bashari dalam karyanya *Musuh Besar Umat Islam, Zionisme, Sekularisme, Atheisme, Sinkretisme, Salibisme, JIL, Oportunisme*, diterbitkan oleh Wihdah Press (penerbit buku-buku Majelis Mujahidin), menjelaskan bahwa sebagaimana jargon-jargon gerakan lain yang dianggap bernuansa menyudutkan Islam seperti fundamentalis, sektarian, primordial, skripturalis, dan semacamnya, maka Islam liberal juga datang dari *non-muslim*, khususnya Barat yang dikenalkan oleh pakar sosiologi dari Universitas Northren Carolina, Charles Kurzman dalam karyanya *Liberal Islam: A Source Book*. Islam liberal, tambah Bashari, dikembangkan dan disebarkan secara internasional, terutama di negara-negara muslim, termasuk Indonesia, karena ide ini tampaknya lebih efektif dapat menggoyahkan akidah Islam.¹²

Menurut Kurzman, Islam liberal memiliki tiga model dalam mendekati dan memahami syari'at Islam. *Pertama*, syari'at liberal.

¹¹ Lihat dalam bab II, hlm. 62.

¹² H. Luthfi Bashari, *Musuh Besar Umat Islam: Zionisme, Sekularisme, Atheisme, Sinkretisme, Salibisme, JIL, Oportunisme* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2003), hlm. Xx-xxi.

Bagi pendukung syari'at liberal, wahyu al-Qur'an dan praktek-praktek nabi memerintahkan atau menghendaki agar kaum muslim mengambil posisi liberal. Secara eksplisit syari'at Islam itu sendiri menekankan liberal, misalnya kasus Ali Bula, ia mengutip al-Qur'an Surah al-Kafirun (Qs: 109:6), "Untukmu agamamu dan untukku agamaku". Ia kemudian menjelaskan secara detail tentang Piagam Madinah, suatu fakta yang ditanda tangani oleh nabi Muhammad dengan suku-suku Yahudi di Madinah pada era awal Islam.

Kedua, syari'at bisu (silent syari'at). Para pendukungnya meyakini bahwa konsistensi itu tidak dikehendaki oleh syari'at, melainkan diperbolehkan atau dibiarkan. Model ini berpendapat bahwa syari'at itu diam pada masalah-masalah tertentu bukan karena wahyu Allah tidak sempurna dan keliru, namun karena wahyu berniat membiarkan isu-isu tertentu agar manusia memilih, karena manusia diberi kekuatan akal dan pikiran, yang harus digunakan untuk berfikir dalam mengatur kehidupan sosial di dunia.

Ketiga, syari'at tertafsir (interpreted syari'at). Penganjurnya yakin bahwa agama itu *syakral*, tetapi interpretasi tentang agama bersifat manusiawi dan duniawi. Teks tidak berdiri sendiri, ia tidak memikul makna di atas pundaknya sendiri. Ia perlu ditafsirkan pada suatu konteks. Ia memuat teori, interpretasinya mengalir dan praduga-praduga bersifat aktif di sini dan ditempat manapun dalam wilayah pemahaman, di dalamnya termasuk teks-teks keagamaan. Oleh karena

itu, interpretasi apapun terhadap teks wahyu tunduk pada perluasan dan penyempitan sesuai dengan asumsi yang mendahului penafsir. Melihat wahyu dalam cermin tafsir, sama dengan seperti ilmuwan melihat kreasi dalam cermin, sehingga jalan bagi demokrasi dan kesatuan *transcendental* agama-agama yang diprediksi atas dasar pluralisme agama akan selalu terbuka.¹³

Islam liberal dianggap mengusung politik Barat ke negeri muslim, yakni memisahkan agama dari pengelolaan negara. Agama adalah urusan pribadi dan hanya menyangkut ritual dan sekedar akhlak, tidak terkait dengan pengelolaan sosial masyarakat, tidak pula menyangkut tentang pemerintahan.¹⁴ Hal ini jelas bertentangan dengan ide dan visi MMI itu, menjadikan syari'at Islam masih sulit untuk diterapkan oleh beberapa aktivisnya, karena MMI memahami Islam berlaku untuk segala aspek kehidupan dan solusi bagi problem manusia sepanjang zaman.

Dalam pandangan kaum muslim liberal, negara yang berlandaskan syari'at Islam, sekarang telah kehilangan relevansinya. Mereka telah menggunakan berbagai dalih untuk menentang sistem ini, karena dianggap akan menghantarkan seseorang yang akan membuat keputusan-keputusan yang amat menentukan kepada

¹³ Zakiyuddin Baidhawiy, *Ambivalensi Agama dan*, hlm. 224-226.

¹⁴ H. Luthfi Bashari, *Musuh Besar Umat Islam; Zioneisme, Sekularisme*, hlm. Xxi.

kediktatoran *absolute*, mereka ini ingin membesarkan demokratisasi dan hampir tak terkecuali.¹⁵

Negara syari'at menurut kalangan muslim liberal sebenarnya menegaskan konsep identitas nasional dan rasa memiliki negara tanah air,¹⁶ seperti halnya di Indonesia selama ini. Pandangan ini memposisikan kelompok pro-syari'at Islam seperti halnya MMI, tidak mementingkan nasionalisme kebangsaan yang telah mengakar serta mendarah daging pada masyarakat Indonesia, namun lebih berpikir atas umat Islam secara keseluruhan di berbagai belahan dunia yang belum tentu bisa bersahabat dengan negara dan bangsa Indonesia, mengingat terjadinya beberapa kasus perselisihan antar negara muslim yang seringkali diselesaikan secara militer, seperti perang Irak-Iran, perang Teluk tahun 1991 antara Irak dan Kuwait, dan beberapa ketegangan yang sering terjadi antara sesama negara muslim.

Berkaitan dengan masalah ini, Leonard Binder dalam karyanya *Islamic Liberalism* berkomentar sebagaimana dikutip oleh David sebagai berikut:

“Bagi umat Islam tradisional, bahasa al-Qur'an merupakan dasar dan pengetahuan mutlak tentang dunia. Bagi umat Islam liberal, bahasa al-Qur'an setara dengan esensi wahyu, tetapi isi dan maknanya pada dasarnya tidak verbal. Berhubung kata-kata dalam al-Qur'an tidak mencakup semua pengertian wahyu, maka ada kebutuhan untuk memahami sesuatu yang didasarkan pada

¹⁵ David Sagiv, *Islam dan Otonitas*, hlm. 205.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 206.

kata-kata, tetapi melampahi kata-kata ini, dengan cara mencari apa yang dicerminkan atau diwahyukan oleh bahasa.¹⁷

Hal ini mungkin merupakan esensi pandangan berbagai kelompok Islam ortodoks. Kutipan di atas menunjukkan kemiripan besar antara “moderat” dan kaum “ekstrimis”. Islam adalah agama tertinggi yang pernah diturunkan, Islam untuk segala ruang dan waktu. Pemerintahan yang merupakan keniscayaan bagi transformasi menjadi dunia yang damai, yaitu dunia Islam –dengan cara mendirikan negara Islam di bawah “perintah Allah” dan menurut syariat Islam, hukum al-Qur'an dan hadis.

H. Luthfi Bashari dalam bukunya tepatnya dalam sub judul tentang *Ulil Abshar Abdalla Menghina Islam*,¹⁸ menjelaskan pendapatnya Ulil Abshar Abdalla –seorang aktivis muda NU yang berhalauan liberal– tentang beberapa hal terkait dengan penafsiran agama yang pada intinya adalah: *Pertama*, penafsiran Islam yang *non-literal*, substansial, kontekstual dan sesuai dengan denyut nadi peradaban manusia yang sedang dan terus berkembang.

Kedua, penafsiran Islam yang dapat memisahkan mana unsur-unsur di dalamnya yang merupakan kreasi budaya setempat, dan mana yang merupakan nilai fundamental. Penafsiran ini menuntut adanya

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 164.

¹⁸ H. Luthfi Bashari, *Musuh Besar Umat Islam: Zioneisme, Sekularisme*, hlm. 67.

pembedaan yang jelas antara ajaran dalam Islam yang merupakan pengaruh kultur Arab dengan yang tidak.

Ketiga, umat Islam hendaknya tidak memandang dirinya sebagai "masyarakat" atau "umat" yang terpisah dari golongan lain. Umat manusia adalah keluarga universal yang dipersatukan oleh kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan adalah nilai yang sejalan, bukan berlawanan dengan Islam.

Keempat, dibutuhkannya struktur sosial yang dengan jelas memisahkan antara kekuasaan politik dan kekuasaan agama. Agama adalah urusan pribadi, sementara pengaturan kehidupan publik adalah sepenuhnya hasil kesepakatan masyarakat melalui prosedur demokrasi. Nilai-nilai universal agama tentu diharapkan ikut membentuk nilai-nilai publik, tetapi doktrin dan praktek peribadatan agama yang sifatnya partikular adalah urusan masing-masing agama.¹⁹

Menurut Ulil, sebagaimana dijelaskan oleh Luthfi Bashari, misi Islam yang paling penting saat ini adalah menegakkan keadilan di muka bumi, terutama di bidang politik dan ekonomi (tentu juga bidang budaya), bukan mengenakan jilbab, mengurung kembali perempuan, memelihara jenggot, memendekan ujung celana, dan lain-lain, yang merupakan masalah *furu'iyah*. Lebih lanjut Ulil menjelaskan bahwa keadilan itu tidak bisa hanya dikhuhtbahkan, melainkan harus

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 67-69.

diwujudkan dalam bentuk sistem dan aturan main, undang-undang dan sebagainya, serta harus diwujudkan dalam perbuatan (penulis: aksi).²⁰

Upaya penegakan syari'at Islam, bagi Ulil adalah wujud ketidakberdayaan umat Islam dalam menghadapi masalah yang menghimpit mereka dan menyelesaikannya dengan cara rasional. Umat Islam menganggap semua masalah akan selesai dengan sendirinya syari'at Islam –dalam penafsirannya yang kolot dan dogmatis –diterapkan di muka bumi. Masalah kemanusiaan tidak dapat diselesaikan semata-mata merujuk kepada “hukum Tuhan” (sekali lagi: saya tidak percaya adanya “hukum Tuhan”, kami hanya percaya pada nilai-nilai ketuhanan yang universal), melainkan harus merujuk kepada hukum-hukum atau sunah yang telah diletakkan Allah sendiri dalam setiap bidang masalah. Bidang politik mengenai hukumnya sendiri, bidang ekonomi, sosial juga demikian dan seterusnya.²¹

Pendapat Ulil tersebut sangat kontras atau berolak belakang dengan pemikiran ustadz Jauhari, di mana ia mengatakan:

“Dalam dunia Islam itu tidak ada kompromi, tidak ada nego-nego. selama hukum Allah ini tidak tegak di muka bumi, itu tidak beres, karena manusia bertuhar kepada akalnya, kalau ada orang bertuhan menurut akalnya, maka sulit dipertanggungjawabkan, dari mana dia tahu kalau Tuhan Allah itu ada, kok nyebut akal. Allah itu tidak kelihatan dan tidak bisa berkomunikasi dengan kita, hanya satu-satunya yang bisa

²⁰ *Ibid.*, hlm. 71.

²¹ *Ibid.*, hlm. 71-72.

berkomunikasi dengan kita adalah al-Qur'an, jadi jika ada orang mengenal Islam ini tidak dengan al-Qur'an, maka ia kafir!"²²

Berangkat dari perkataan Jauhari tersebut, dapat dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum jika tidak didasarkan pada al-Qur'an, berarti kafir, dan tidak ada proses nego atau tawar menawar dalam menentukan aturan atau hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam liberal menurut MMI adalah golongan yang telah keluar dari agama. Hal ini karena MMI melihat golongan Islam liberal tidak menjadikan al-Qur'an sebagai dasar dalam berijtihad, melainkan menggunakan akal yang sulit dipertanggungjawabkan.

Kategori kafir sebagaimana yang disampaikan Jauhari di atas, jika dikaitkan dengan pemikiran Ulil, maka dapat dikatakan Ulil telah keluar dari agama (kafir). Sebab, kategori kafir menurut Jauhari adalah orang yang mengutamakan akal (rasio) di atas al-Qur'an dalam menentukan arah kebijakan dan aturan hukum bagi manusia. Ulil juga menyebutkan bahwa upaya penegakan syari'at Islam adalah wujud ketidakberdayaan umat Islam dalam menghadapi masalah yang menghimpit mereka dan menyelesaikannya dengan cara yang tidak rasional. Umat Islam menganggap semua masalah akan selesai dengan sendirinya manakala syari'at Islam dalam penafsirannya yang kolot dan dogmatis, diterapkan di muka bumi.

²² Pemikiran Jauhari ini disampaikan dalam pengajian Ahad pagi tanggal 21 Mei 2006 di Markaz Pusat MM.

Selain itu, pandangan Islam liberal juga memahami dengan pengertian, jika syari'at Islam adalah suatu "paket lengkap" yang sudah jadi. Suatu resep dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah di segala zaman, yang menurut Ulil adalah wujud ketidaktahuan dan ketidakmampuan memahami sunah Tuhan itu sendiri. Mengajukan syari'at Islam sebagai solusi atas semua masalah adalah bentuk lain dari kemalasan berpikir, atau lebih parah lagi, merupakan cara untuk lari dari masalah, sebuah bentuk *eskapisme* dengan memakai alasan hukum Tuhan.²³

Eskapisme inilah yang menjadi sumber kemunduran umat Islam dimana-mana. Ulil dalam hal ini tidak dapat menerima "kemalasan" semacam ini, apalagi jika ditutup-tutupi dengan alasan, itu semua demi menegakkan hukum Tuhan. Jangan dilupakan: tak ada hukum Tuhan, yang ada adalah sunah Tuhan serta nilai-nilai yang dimiliki semua umat manusia.²⁴

Musuh Islam paling berbahaya sekarang ini adalah dogmatisme, sejenis keyakinan yang tertutup bahwa suatu doktrin merupakan obat mujarab atas semua masalah, dan mengabaikan bahwa kehidupan manusia terus berkembang, dan perkembangan peradaban manusia

²³ *Ibid.*, hlm 72.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 72-73.

dari dulu hingga sekarang adalah hasil usaha bersama, akumulasi pencapaian yang disangga semua bangsa.²⁵

Ulil juga berpendapat bahwa tujuan Islam adalah untuk menegakkan keadilan di muka bumi, bukan hanya dipahami sebagai upaya menjadikan Islam sebagai dogma, yang tidak mempunyai landasan kritis dan dianggapnya sebagai bentuk kemalasan dan ketidakberdayaan umat Islam dalam upaya memecahkan problem zaman.

Oleh karena itu, Islam sebetulnya lebih tepat disebut sebagai sebuah "proses" yang tidak pernah selesai, ketimbang sebagai sebuah "lembaga agama" yang sudah mati, kaku beku, *jumud* dan mendukung kebebasan. Ayat al-Qur'an *inna dina 'indallahi al-Islam* (Qs: 3:19) lebih tepat diterjemahkan sebagai, "sesungguhnya jalan religius yang benar adalah *proses-yang-pernah-selesai* menuju ketundukan (kepada Yang Maha Benar).²⁶

Dengan tanpa sungkan dan kikuk, Ulil mengatakan, semua agama adalah tepat berada pada jalan seperti itu, jalan panjang menuju Yang Maha Benar. Semua agama, dengan demikian, adalah benar, dengan variasi, tingkat dan kadar kedalaman yang berbea-beda dalam menghayati jalan religius itu. Semua agama ada dalam satu keluarga

²⁵ *Ibid.*, hlm. 73.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 74.

besar yang sama, yaitu keluarga pecinta jalan menuju kebenaran yang tak pernah ada ujungnya.²⁷

Agama adalah suatu kebaikan buat umat manusia, dan karena manusia adalah organisme yang terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, maka agama harus bisa mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri, yang ada adalah hukum manusia, bukan hukum Tuhan, karena manusialah *stake holder* yang berkepentingan dalam semua perbincangan soal semua agama ini. Jika Islam diseret kepada suatu penafsiran yang justru berlawanan dengan *maslahat* manusia itu sendiri atau meniadakan manusia itu, maka Islam semacam ini adalah agama fosil yang tak lagi berguna buat umat manusia.²⁸

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan, jika apa yang disampaikan Uliil sebagai aktivis Islam liberal, hampir semuanya bertentangan dengan dasar teologis dan visi dari Majelis Mujahidin Indonesia, seperti halnya tentang penafsiran agama yang bagi Uliil adalah dimaknai sebagai proses yang pernah selesai dan hukum adalah hukum manusia, bukan hukum Tuhan. Dari situ, beberapa landasan teologis dan perjuangan MMI seakan dianggap suatu hal yang mati, dan kaku.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Para politikus sekuler di Indonesia, oleh MMI dianggap sebagai kekuatan yang menghalangi tegaknya syari'at Islam. Tujuan politik Islam pada hakekatnya adalah menyelamatkan umat manusia yang berada dalam satu kesatuan kelompok sosial khususnya dalam bentuk bangsa dan negara agar selamat dari kesesatan, kerugian dan kerusakan. Politik Islam yang pada hakekatnya adalah perjuangan penegakan syari'at Islam dalam lingkup bangsa-negara jelas untuk menyelamatkan bangsa-negara itu dari krisis-krisis sosial, bermoral, aman sejahtera, mendatangkan manfaat pada bangsa lain, bukan mengeksploitasi atau menjajah bangsa lain.²⁹

Dalam hal sekulerisasi politik, Irfan S. Awwas berpendapat:

“Saat ini, ideologi sekuler dilindungi oleh negara, padahal ideologi sekuler memiliki paradoks moralitas. Seperti di Perancis, orang telanjang lebih dihargai dari pada orang berjilbab, orang yang mabuk, judi dan zina lebih dihargai dari pada orang yang menyerukan ajaran agama agar meninggalkan mabuk, judi dan zina.”³⁰

Dalam hal politik Islam, *pertama*, pemimpin formal dalam skala nasional (presiden) maupun regional (gubernur dan bupati) seharusnya adalah muslim tat syari'at dan berorientasi pada pemberlakuan syari'at Islam. *Kedua*, hukum yang diberlakukan seharusnya meliputi: *hukud*, *qishas* dan *ta'zir* yang dipandu oleh al-Qur'an dan hadis yang akan membawa rasa aman dan keharmonisan sosial. *Ketiga*, sistem ekonomi

²⁹ H. Lutfi Bashari, *Musuh Besar Umat Islam; Zioneisme, Sekularisme*, hlm. Xvii.

³⁰ Wawancara dengan Irfan S. Awwas, 18 Mei 2006, di Markaz Pusat MM.

nasional yang berjalan seharusnya ekonomi anti-riba dan anti bisnis barang haram atau maksiat. Tatanan ekonomi seperti ini akan menghalangi eksploitasi terhadap rakyat yang lemah dan akan membawa kepada kesejahteraan yang adil dan merata. *Keempat*, budaya yang berkembang di masyarakat perlu dikendalikan agar terarah, anti-maksiat.³¹

Krisis sosial dan keterpurukan akan semakin berat bila pengelolaan negara ini meninggalkan syari'at Islam dan menggunakan sistem sekuler. Perjalanan bangsa Indonesia jelas telah menunjukkan kegagalan serius dalam upaya pembangunan bangsa dan negara karena menerapkan metode sekuler dalam pengelolaan negara ini. Alternatif penerapan syari'at Islam adalah harapan satu-satunya untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa dan keluar dari krisis nasional, apalagi mayoritas bangsa Indonesia adalah muslim. Politik Islam inilah yang diperjuangkan oleh aktivis Islam Indonesia (MMI) dan sedang diusahakan untuk diencerkan atau dilemahkan oleh musuh Islam melalui kampanye tokoh-tokoh Islam sendiri.³²

Kaum sekuler memandang, cita-cita penerapan syari'at Islam bisa merusak nasionalisme dan rasa adil sesama warga negara yang *non-muslim*, mereka berpegang pada sistem demokrasi yang dianggap bisa menjadi sistem danaturan paling cocok untuk masyarakat modern.

³¹ H. Luthfi Bashari, *Musuh Besar Umat Islam, Zionisme, Sekularisme*, hlm. Xix.

³² *Ibid.*, hlm. Xx.

Oleh karena itu, lembaga negara syariat Islam ini, dianggap paling-paling menyimbolkan kerinduan (*romantisisme*) umat Islam akan kejayaan orang-orang Arab dan umat Islam pada masa silam.³³

Cita-cita membangun sistem sekuler, berpegang pada teori yang menyatakan bahwa agama sama sekali tidak menekankan kewajiban mendirikan negara. Agama menurut mereka hanya memberikan nilai etik-moral dalam membangun tatanan masyarakat dan negara. Islam dihadapan mereka tidak dibangun atas rekomendasi ayat-ayat yang bersifat tekstual. Selain argumentasi yang dilontarkan bahwa tidak ada ayat al-Qur'an yang secara eksplisit mewajibkan orang Islam membentuk pemerintahan dan Negara, mereka juga seringkali menggunakan penafsiran kontekstual dalam mendekati agama. Di samping itu, dalam kerangka teologisnya, kaum sekuler menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan dan negara Islam tidak termasuk dalam tugas sebagaimana diwahyukan Tuhan kepada nabi Muhammad. Ia hanyalah rasul yang semata-mata membawa panggilan agama yang di dalamnya tidak termasuk pemerintah mendirikan suatu negara.³⁴

Relasi agama dan negara yang menganut paham sekuler, dalam sejarah pernah diperlihatkan pada pemerintahan Musthafa Kamal

³³ David Sagiv, *Islam dan Otentitas*, hlm. 206.

³⁴ Ali Abd al-Raziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukum: Bahs al-Khilafiyah wa al-Hukumah fi al-Islam* (Kairo: Maktabah al-Musyarakah, 1925), hlm. 64-65. Lihat juga Abd Salam Arief, "Politik Islam antara Akidah dan Kekuasaan" dalam *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia* (Yogyakarta: SF-Ins Publishing, 2004), hlm. 7-8.

(kamal Attartruk) di Turki.³⁵ Di bawah kekuasaannya, Turki diperintah dengan mendasarkan pada ideologi negara sekuler. Namun, dalam perkembangan pemerintahannya yang meskipun kelompok Kemalis telah berhasil terorganisir sejak permulaan tahun 1920-an, dalam kenyataan politiknya melahirkan konfigurasi politik yang tidak produktif bagikelanjutan cita-cita Turki menjadi negara sekuler. Turki terus berada di bawah bayang-bayang ketegangan relasi agama dan negara yang sangat akut dan melahirkan organisasi-organisasi berlatar agama sebagai ideologinya yang tidak jarang melakukan gerakan melawan pemerintahan yang berkuasa. Sekularisme yang sebenarnya menghendaki pemisahan antara agama dan negara secara tegas, dalam kenyataannya justru mempersubur gerakan militan yang berbasis pada agama.

Selain itu, menurut Irfan S. Awwas demokrasi memiliki dua kebusukan. *Pertama*, aturan *one man one vote* menunjukkan bahwa demokrasi menyamakan harga diri yang saleh dengan orang yang salah, menyamakan harga diri seorang ulama dengan pelacur, yang artinya kebenaran itu tidak ada standarnya kecuali hanya sebatas pada sebuah suara. Padahal dalam Islam kebenaran itu ditentukan oleh Allah semata, bukan oleh suara terbanyak. *Kedua*, demokrasi menginginkan adanya kedaulatan rakyat bukan kedaulatan Tuhan.

³⁵ Tentang pergerakan Kamal Attartruk lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 142.

Kedaulatan dalam sistem demokrasi itu sendiri bagi Irfan S. Awwas bukanlah kedaulatan rakyat, melainkan kedaulatan para elit yang mengklaim sebagai wakil rakyat. Demokrasi dan sekuler yang diusung oleh Amerika Serikat dan Barat inilah menurut Awwas sebagai musuh utama dalam perjuangan penegakan syari'at Islam. Demokrasi adalah sebuah sistem yang menghendaki berkuasanya kedaulatan rakyat, dan sekularisme adalah ideologi yang ingin menyingkirkan agama dari wilayah kenegaraan, yang artinya adalah menghapus konsep *din wa daulat* dalam Islam.³⁶

Kalangan yang menerima ide sekularisasi namun dengan berbagai batasan dan revisi, seperti halnya Republik Indonesia dan Malaysia yang membangun negara dengan kerangka demokrasi. Formatnya menggunakan dengan bangunan ideologi nasionalisme, namun tetap mengupayakan akomodasi nilai-nilai religius dan kultur setempat. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan, Malaysia menempatkan Islam sebagai asas resmi negara, sedangkan Indonesia memposisikan Islam sebagai agama yang dilindungi negara. Meskipun Islam dijadikan sebagai agama resmi negara, Malaysia tetap menggunakan konstitusi sekuler (artinya tidak menempatkan al-Qur'an dan hadis sebagai konstitusi formal), sebagaimana layaknya negara

³⁶ Wawancara dengan Irfan S. Awwas, 18 Mei 2006, di Markaz Pusat MM.

Islam yang memosisikan al-Qur'an dan hadis sebagai konstitusi tertinggi.³⁷

Dalam konteks Indonesia, mungkin tidak sama dengan apa yang terjadi di Turki ataupun Malaysia, namun setidaknya ada kondisi yang sama, yaitu banyaknya gerakan menuntut penerapan syari'at Islam pada negara oleh kelompok-kelompok pro-syari'at Islam. Terkait dengan hal ini, tentunya Majelis Mujahidin Indonesia merupakan sebuah aliansi gerakan yang secara tegas ingin menegakkan syari'at Islam di Indonesia dengan menggantikan sistem sekuler. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Jauhari dalam forum kajian Ahad pagi di Markaz Pusat Majelis Mujahidin, tanggal 21 Mei 2006, ia menyatakan:

“Suatu negara dapat dikatakan Islam jika semua aturan perundang-undangan didasarkan dari al-Qur'an, jika selain itu maka kafir, tidak ada tawar-menawar dan kompromi. Jadi di dunia ini kan ada dua macam, kalau tidak kafir ya iman, jangan pakai yang remang-remang. Jadi ciri-ciri dakwah Islam itu antara lain, wadah itu tidak boleh kompromi, kalau ada orang bertuhan menurut akalanya maka akan sulit untuk dipertanggungjawabkan”.³⁸

Menurut pendapatnya, dapat disimpulkan jika MMI menganggap

- o kalangan muslim liberal dan sekuler adalah kafir, karena tidak mau menegakkan hukum yang bersumber dari al-Qur'an, bahkan menggunakan akalanya dalam membuat aturan hukum dan tidak

³⁷ Mukhlis Syarkun dan W. Ghorara, *Dunia Islam dalam Benturan Kepentingan dan Peradaban, dalam Negara Tuhan; The Thematic Encyclopedia* (Yogyakarta: SR Ins Publicing, 2004), hlm. 432.

³⁸ Jauhari, dalam kajian Ahad pagi tanggal 21 Mei 2006, di Markaz Pusat MM.

berdasarkan aturan yang diajarkan al-Qur'an. Seperti apa yang telah menjadi misi Majelis Mujahidin Indonesia adalah penegakan syari'at Islam, dimaknai sebagai perjuangan formalisasi Islam dalam lembaga negara, sehingga apa yang disampaikan oleh kalangan liberal dianggap sebagai pola yang kafir dan anti syari'at Islam.

Sebagai faktor yang dianggap menghambat dan menghalangi gerakan MMI, kalangan muslim liberal dan sekuler juga mempunyai dasar tersendiri untuk membangun kehidupan beragama dan bernegara. Menurut aliran ini, agama dan negara harus berada dalam hubungan yang bersifat simbiotik, yakni suatu hubungan timbal balik yang saling memerlukan antar keduanya. Negara menurutnya memerlukan panduan etika dan moral sebagaimana diajarkan agama. Sementara itu, agama sendiri memerlukan juga kawalan negara untuk kelestarian dan eksistensinya. Dengan hubungan seperti itu, keduanya berada dalam suatu dimensi *simbiosis mutualis*.

Adapun corak teologi yang dijadikan landasan oleh kelompok ini adalah bahwa relasi agama dan negara didasarkan pada prinsip-prinsip etis. Keyakinan teologis seperti ini bagi mereka menjadi sah, karena secara argumentatif bahwa tidak ada suatu konsep yang secara jelas berisikan ketentuan-ketentuan tentang sumber kekuasaan negara, pihak pelaksana kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu diperoleh, kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggungjawab dan

seterusnya.³⁹ Berdasarkan pada logika-logika itulah, aliran ini menyatakan dengan tegas jika Islam sama sekali tidak mewajibkan kepada umatnya untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara.

2. Tantangan dari *Non-Muslim*.

Golongan yang menentang tegaknya syari'at Islam, selain terjadi di internal sesama muslim, tentunya terdapat penentang dari golongan luar Islam, sebagaimana telah terjadi sejak zaman awal Islam di Arab. Seperti perang Salib, atheisme, orientalisme, zionisme, dan seterusnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Irfan S. Awwas sebagai berikut:

"Penghalang utama tegaknya syari'at Islam adalah kaum kafir, seperti halnya Barat. Mereka menggunakan jargon HAM, demokrasi, bahkan keadilan, namun mereka sendiri justru melanggarnya. Banyak para sarjana Barat yang melakukan kajian tentang Islam untuk kepentingan melemahkan Islam, kenapa umat kita tidak mau melakukannya?"⁴⁰

Gesekan yang terjadi antara golongan muslim pro-syari'at Islam dengan kalangan *non-muslim* mempunyai sejarah panjang, seringkali terjadi benturan yang tidak hanya bertaraf perang pemikiran dan ideologi, namun juga sering terjadi perang fisik yang banyak memakan korban. Di sini, penulis akan sampaikan beberapa ulasan mengenai kalangan *non-muslim* yang dianggap menghalangi tegaknya syari'at Islam oleh MMI.

³⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UMAT ISLAM-Press, 1990), hlm. 2-3.

⁴⁰ Wawancara dengan Irfan S. Awwas, 18 Mei 2006, di Markaz Pusat MM.

a. **Orientalisme.**

Sa'aduddin as-Sayyid Shalih dalam karyanya *Jaringan Konspirasi Menentang Islam*, menerangkan bahwa orientalisme adalah gerakan yang berkecimpung dalam bidang penelitian agama, ilmu, tradisi, peradaban, dan kebudayaan masyarakat Timur (Afrika, Asia dan Islam) untuk tujuan menyelami rahasia, sifat, watak, pemikiran. Sebab, yang menjadikan kemajuan dan kekuatan masyarakat Timur.⁴¹ Dari situ dapat diartikan bahwa orientalisme adalah gerakan kajian yang dilakukan oleh kalangan akademisi Barat tentang Timur (Islam) untuk kepentingan ilmu pengetahuan, politik, agama dan seterusnya.

Para orientalis telah mengkaji Timur dan Islam darisekala macam aspek, termasuk akidah, syari'at, pemikiran, tatanan hidup, kebudayaan, dan filsafat. Kajian Islam yang mereka lakukan ini bermanfaat bagi Islam sendiri dan tidak akan merugikan Islam, karena memang Islam adalah suatu kebenaran jika dikaji dengan cara yang benar. Islam dapat diibaratkan bagai gunung-gunung yang kokoh. Setiap kali musun menyerangnya dengan cara-cara *bathil*, hal itu sama sekali tidak membuat Islam menjadi lemah, bahkan mereka sendiri yang akan kalah.⁴²

⁴¹ Sa'aduddin as-Sayyid Shalih, *Jaringan Konspirasi Menentang Islam* (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), hlm. 117.

⁴² *Ibid.*, hlm. 122.

Islam tidak pernah gentar menghadapi orientalis, justru sebaliknya, merekalah yang gentar menghadapi Islam. Sebab, para orientalis ini melakukan kajian berdasarkan kaidah yang benar dan dilakukan secara detail. Metode kajian semacam ini sudah pasti menghasilkan sikap penerimaan mereka terhadap ajaran Islam. Sayangnya, kebanyakan orientalis melakukan kajian dengan metode yang salah, karena berbagai faktor, di antaranya sebagai berikut: *pertama*, terpengaruh oleh keyakinan. Dalam mengkaji Islam mereka terpengaruh oleh pemikiran, bahwa Islam itu agama yang salah. Sikap semacam ini bertentangan dengan metode penelitian ilmiah yang mengharuskan para peneliti bersikap netral dan tidak terpengaruh oleh hipotesis apapun, agar memperoleh kesimpulan yang benar berdasarkan dalil dan *hujah* yang ditelitinya secara objektif.⁴³

Kebanyakan orientalis telah mengambil sikap bermusuhan dan niat buruk terhadap Islam, bahkan tidak bermaksud melakukan penyelidikan dengan penuh keikhlasan untuk memperoleh kebenaran. Mereka bersikap buta tuli, dan tidak mau mengakui kebenaran yang diperolehnya dalam penelitian tentang Islam.

Maurice Bucaille, seorang orientalis Perancis, telah mengakui bahwa masyarakat Barat pada umumnya telah di doktrin oleh pemahaman Islam secara salah. Para orientalis berusaha

⁴³ *Ibid.*

dengan keras menciptakan citra buruk tentang al-Qur'an di mata generasi muda mereka. Maurice Bucaille dalam hal ini menyatakan sebagaimana dikutip oleh Sa'aduddin as-Sayyid sebagai berikut:

“Saat saya kecil, saya telah mempelajari, bahwa Muhammad adalah orang yang mengarang al-Qur'an. Saya seringkali dijejali keterangan bahwa al-Qur'an tersebut telah mengumpulkan kisah-kisah yang berasal dari kitab Taurat dan Injil kemudian di jadikan al-Qur'an”.⁴⁴

Bucaille juga menegaskan, bahwa dirinya terpengaruh oleh keyakinan yang semacam itu dalam masa yang cukup lama sampai ia sendiri melakukan kajian tentang Islam, dan menyadari akan adanya penyelewengan dan pemutarbalikan kebenaran oleh para orientalis.⁴⁵

Kedua, sumber-sumber yang digunakan oleh orientalis dalam mengkaji masalah-masalah akidah dan pemikiran Islam, seharusnya diambil dari sumber aslinya bukan dari tangan orang lain atau sumber kedua. Anahnya, para orientalis dalam mengkaji Islam tidak pernah merujuk kepada sumber-sumber aslinya, melainkan berpegang pada cerita-cerita Israiliyyah, kisah-kisah *khurafat*, dan dongeng-dongeng *musykil*. Dalam kajian Islam, mereka mengambil apa saja keterangan yang memberi keuntungan kepada mereka. Keterangan-keterangan tersebut lalu dibawa ke

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 124.

⁴⁵ *Ibid.*

sana ke mari untuk dipilah-pilah sesuai keperluan. Bagi mereka yang penting adalah mencapai target.⁴⁶

Ketiga, para orientalis ini sebagian besar tidak mengerti bahasa timur dengan baik, bahkan ada yang sama sekali tidak tahu, seperti Self Tredy, Aqless, Gerald Metar, dan Erin Onan. Dr. Ahmad Syadyaq pernah berkata sebagaimana ditulis oleh Sa'aduddin as-Sayyid sebagai berikut:

“Para orientalis sesungguhnya tidak pernah menimba ilmu dari guru-guru yang ahli dibidangnya. Mereka melompat dari seorang ke orang lain dan pergi ke sana ke mari untuk mencari bahan. Kalau ada di antara mereka yang mempunyai ilmu, biasanya adalah dari kalangan Pendeta yang telah merakayasa dan kepalanya dipenuhi mimpi yang bukan-bukan, kemudian mereka mengaku tahu tentang ini dan itu dari ajaran Islam. Padahal sebenarnya mereka bodoh. Setiap orang dari mereka jika mempelajari bahasa Timur lalu menterjemahkannya, maka kita dapat mengetahui jika pengetahuan mereka lemah dan terjemahan mereka penuh hdg kekaburan karena mereka hanya mengambilnya untuk memenuhi selera mereka. Jika mereka menemukan hal yang masih kabur, maka mereka membuat penafsiran sendiri dan ditopang dengan hal yang lemah kemudian ditonjolkan menjadi hal-hal yang sebenarnya tidak penting sebagai pegangan”.⁴⁷

Keempat, para orientalis keliru dalam memahami keadaan orang-orang Islam, yang menganggap semua realitas yang terdapat pada orang-orang Islam, identik dengan Islam itu sendiri. Seharusnya dalam melakukan penelitian yang sehat, ada metode untuk dapat membedakan antara teori dan praktek. Hakekat Islam

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 125.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 126.

adalah suatu aksi yang tidak menjadi rusak karena praktek-praktek yang keliru dari penganut Islam. Karena itu, kesalahan-kesalahan orang Islam tidaklah dapat ditimpakan kepada ajaran Islam itu sendiri. Kebenaran Islam tetap akan kekal, walaupun umat Islam mengalami kesesatan dan bukan Islam. Para orientalis melakukan hal yang tidak wajar ketika mereka mendapati kemunduran umat Islam yang begitu lama sebagai alasan untuk menyatakan kelemahan dan kekurangan Islam.⁴⁸

Dari uraian di atas, dapat dilihat bagaimana para orientalis melakukan penelitian tentang Islam, yang bagi umat Islam tentunya banyak dijadikan objek penelitian dan dapat merugikan Islam secara umum. Berkaitan dengan hal ini, Irfan S. Awwas berkomentar:

“Salah satu ciri orientalis adalah, meneliti Islam tidak dengan memahami ajaran Islam, sehingga menghasilkan temuan yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, apalagi mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang kadang ditujukan untuk melemahkan Islam. Dari sinilah awal mulanya Islam dijadikan sebagai objek kajian oleh Barat, dan kita harus melawannya dengan perang pemikiran, karena bisa mengancam dan menghalangi tegaknya syariat Islam”.⁴⁹

Gerakan orientalis telah membawa pengaruh serta akibat tertentu, melalui usahanya menghidupkan kembali naskah-naskah Arab kuno, menerbitkan dari sebagian buku-buku tersebut,

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Wawancara dengan Irfan S. Awwas, 18 Mei 2006, di Markaz Pusat MM.

menganalisa dan menerjemahkannya ke dalam berbagai bahasa Barat. Meskipun demikian, pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan orientalis ini ternyata lebih merugikan kepentingan kaum muslim. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, yakni: *pertama*, serangan pemikiran terhadap kaum muslimin, terutama terhadap agama Islam. Hal ini mengakibatkan banyak di antara orang-orang Islam yang hanya tinggal namanya saja, sedangkan pemahaman tentang agamanya kosong. Akibat dari serangan pemikiran ini secara tidak langsung membantu menghilangkan tradisi, hukum dan undang-undang Islam. Secara prinsipil, pengaruh semacam ini sangat berbahaya bagi kehidupan kaum muslimin.

Kedua, para orientalis berhasil membukakan jalan bagi segolongan umat Islam yang berpikir ke-barat-baratan, mengikuti pola pikir mereka dan merasa sejiwa dengan para orientalis dalam mengikuti rekayasa pemikiran yang diinginkan, akhirnya karakteristik mereka persis sebagaimana kaum orientalis. Lahiryahnya memang mereka lahir di negara Islam, tetapi pemikiran dan jiwa mereka yang telah teracuni oleh pola pendidikan Barat, cenderung mengubah kebiasaan dan sikap mereka menjadi ke-barat-baratan. Mereka ini selalu mengekor kepada apa saja yang disodorkan oleh Barat.⁵⁰

⁵⁰ Sa'aduddin as-Sayid Shafih, *Jaringan Konspirasi*, lhm. 131.

Umat Islam (Majelis Mujahidin) memosisikan para orientalis seperti apa yang telah diuraikan di atas, beberapa penelitian tentang Timur (Islam) yang dilakukan oleh para orientalis, tidak lain hanyalah ditujukan untuk mempelajari segala seluk beluk Timur (Islam), kemudian untuk dilemahkan.

Bagaimana umat Islam mesti menghadapi kaum orientalis? Setiap orang Islam perlu bergerak, dengan dipelopori oleh para ulama. Untuk itu, dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, para ulama (cendekiawan, sarjana, ilmuwan dan lain-lain), harus bangkit dengan penuh kesungguhan menulis buku-buku berkaitan dengan persoalan-persoalan ilmiah, dan mengemukakan dasar-dasar ajaran Islam yang sebenarnya kepada dunia Barat.

Kedua, tulisan-tulisan para orientalis yang bernada negatif dan cenderung *pejoratif* terhadap Islam yang dikemukakan dengan polesan ilmiah, dianalisis dan dikaji berdasarkan konsep dan fakta sebenarnya, sehingga dapat diungkapkan secara jelas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan demikian, kiranya apa yang selama ini telah dilakukan para orientalis, akan dapat dipatahkan, kemudian untuk dibenarkan sesuai dengan Islam yang sebenarnya.

MMI sebagai kekuatan yang ingin menegakkan syariat Islam, tentunya harus memikirkan untuk melakukan upaya menandingi apa yang telah dilakukan para orientalis, jangan hanya

terjebak untuk memformalkan syari'at Islam tanpa melakukan *counter opinion* secara ilmiah (bukan doktriner) terhadap temuan yang dihasilkan para orientalis.

Bagaimanapun juga, orientalisme mempunyai mekanisme sendiri dalam melakukan kajian dan penelitian, namun mereka juga punya andil dalam pengembangan keilmuan yang selama ini banyak dipelajari oleh kalangan Timur atau Islam. Segala sesuatunya yang menyangkut orientalisme, hendaknya dapat dipetik hikmahnya oleh kalangan Islam dan Timur, agar dikemudian hari tidak terjebak pada perdebatan yang tidak dapat memberi aspek manfaat.

b. Hegemoni Barat (kafir) atas Negeri Muslim.

Barat yang identik dengan negara maju, modern, namun bagi MMI, Barat adalah imperialis, kolonialis, dan seterusnya. Demikian juga Barat melihat MMI sebagai kelompok muslim radikal, revivalis, *antagonistic* dan seterusnya. Dari beberapa istilah tersebut telah menyiratkan kesimpulan, jika antara MMI dan Barat adalah dua kubu yang saling bermusuhan dalam konteks politik, sosial, budaya, ideologi, teologi dan seterusnya.

Irfan S. Awwas, sebagai Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, mengatakan:

“Dengan jargon demokrasi, Barat telah banyak melakukan kejahatan atas negara-negara muslim, membuat *stigma* jelek untuk aktivis Islam, menganggap teoris pejuang syari'at

- Islam, memaksakan hukum kepada negara Islam, mengatur ekonomi, membatasi militer, mengontrol teknologi, untuk diambil keuntungan. Jika Barat ingin mengatur Islam, kenapa mereka tidak mau diatur oleh Islam, jelas dia itu kafir, yang segala bentuk aturannya adalah melanggar syari'at Islam".⁵¹

Dengan demikian, Irfan S. Awwas *men-display* tentang beberapa hal menyangkut peran Barat beserta sekutunya yang banyak melakukan tindakan *controlling* terhadap negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya Islam seperti Indonesia. Padahal seringkali, menurut Irfan S. Awwas, Barat itu hanya ingin mengambil keuntungan dari setiap tindakan yang dilakukan atas negara-negara muslim.

Lebih lanjut Irfan S. Awwas menjelaskan jika salah satu faktor penghalang tegaknya syari'at Islam adalah Barat dan demokrasi, MMI secara tegas menolak demokrasi, karena tidak sesuai dengan hukum Allah. Islam mempunyai dasar dan konsep pemerintahan menurut syari'at Islam, jika umat Islam menggunakan demokrasi sebagai landasan bernegara, maka sebenarnya mereka telah terhegemoni oleh kafir. Apalagi di negeri yang mayoritas penduduknya muslim seperti Indonesia, sudah selayaknya syari'at Islam dijadikan dasar hukum dan bernegara, jika masih seperti sekarang ini yang sekuler, maka sebenarnya

⁵¹ Wawancara dengan Irfan S. Awwas, 18 Mei 2006, di Markaz Pusat MM.

terjebak untuk memformalkan syari'at Islam tanpa melakukan *counter opinion* secara ilmiah (bukan doktriner) terhadap temuan yang dihasilkan para orientalis.

Bagaimanapun juga, orientalisme mempunyai mekanisme sendiri dalam melakukan kajian dan penelitian, namun mereka juga punya andil dalam pengembangan keilmuan yang selama ini banyak dipelajari oleh kalangan Timur atau Islam. Segala sesuatunya yang menyangkut orientalisme, hendaknya dapat dipetik hikmahnya oleh kalangan Islam dan Timur, agar dikemudian hari tidak terjebak pada perdebatan yang tidak dapat memberi aspek manfaat.

b. Hegemoni Barat (kafir) atas Negeri Muslim.

Barat yang identik dengan negara maju, modern, namun bagi MMI, Barat adalah imperialis, kolonialis, dan seterusnya. Demikian juga Barat melihat MMI sebagai kelompok muslim radikal, revivalis, *antagonistic* dan seterusnya. Dari beberapa istilah tersebut telah menyiratkan kesimpulan, jika antara MMI dan Barat adalah dua kubu yang saling bermusuhan dalam konteks politik, sosial, budaya, ideologi, teologi dan seterusnya.

Irfan S. Awwas, sebagai Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, mengatakan:

“Dengan jargon demokrasinya, Barat telah banyak melakukan kejahatan atas negara-negara muslim, membuat *stigma* jelek untuk aktivis Islam, menganggap teoris pejuang syari'at

Islam, memaksakan hukum kepada negara Islam, mengatur ekonomi, membatasi militer, mengontrol teknologi, untuk diambil keuntungan. Jika Barat ingin mengatur Islam, kenapa mereka tidak mau diatur oleh Islam, jelas dia itu kafir, yang segala bentuk aturannya adalah melanggar syari'at Islam".⁵¹

Dengan demikian, Irfan S. Awwas men-*display* tentang beberapa hal menyangkut peran Barat beserta sekutunya yang banyak melakukan tindakan *controlling* terhadap negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya Islam seperti Indonesia. Padahal seringkali, menurut Irfan S. Awwas, Barat itu hanya ingin mengambil keuntungan dari setiap tindakan yang dilakukan atas negara-negara muslim.

Lebih lanjut Irfan S. Awwas menjelaskan jika salah satu faktor penghalang tegaknya syari'at Islam adalah Barat dan demokrasi, MMI secara tegas menolak demokrasi, karena tidak sesuai dengan hukum Allah. Islam mempunyai dasar dan konsep pemerintahan menurut syari'at Islam, jika umat Islam menggunakan demokrasi sebagai landasan bernegara, maka sebenarnya mereka telah terhegemoni oleh kafir. Apalagi di negeri yang mayoritas penduduknya muslim seperti Indonesia, sudah selayaknya syari'at Islam dijadikan dasar hukum dan bernegara, jika masih seperti sekarang ini yang sekuler, maka sebenarnya

⁵¹ Wawancara dengan Irfan S. Awwas, 13 Mei 2006, di Markaz Pusat MM.

umat Islam Indonesia telah tunduk dan patuh pada aturan minoritas *non-muslim*.⁵²

Indonesia adalah sebuah negara Islam dengan penduduknya 90% beragama Islam. Negara ini pernah terperosok ke dalam kondisi penjajahan colonial Inggris, Portugis dan Belanda. Indonesia menjadi ajang untuk mencari keuntungan ekonomi (perdagangan) dengan mengambil kekayaannya untuk dibawa ke negeri asalnya, politik dengan mendirikan pemerintahan colonial, dan upaya kristenisasi. Untuk menyebut tiga motif tersebut, kolonialisme mempunyai tujuan untuk misi *Gold, Glori* dan *Gospel*. Setelah merdeka pada tahun 1945, penjajahan ternyata belum selesai, kini menggunakan alat hegemoni ekonomi dengan sistem kapitalisme.

Berkaitan dengan hal ini, Muhammad Tholib, Wakil Amir I Majelis Mujahidin, menyatakan:

“Antara muslim dan kafir jelas perbedaannya, yang kafir jelas kekafirannya dan kalian ada di jalan Allah, jika terjadi interaksi di antara kamu dan kafir, yang harus dilakukan adalah jangan kamu ikuti mereka, kalau mereka mengajak bertengkar ya di lawan! Kita yang benar, kok disuruh ikut mereka”.⁵³

Ungkapan Tholib tersebut, mengandung sebuah anjuran agar umat Islam tidak tunduk dan taat terhadap kepentingan Barat yang

⁵² *Ibid.*

⁵³ Wawancara dengan Muhammad Tholib, 21 Mei 2006, di Markaz Pusat MM.

kafir, bahkan harus melawan, karena mereka yang salah dan Islam itu benar. Jika terjadi pemaksaan, konfrontasi fisik pun boleh dilakukan untuk membela kebenaran di jalan Allah. Seperti halnya jargon demokrasi, seringkali Barat menggunakannya sebagai dalih untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pihaknya, seperti pada kasus Irak, AS dan sekutunya dengan dalih demokrasi dan pelucutan senjata pemusnah massal, melakukan invasi militer yang membuat Irak hancur.

Majelis Mujahidin Indonesia, memang sering diposisikan oleh Barat dan sekutunya sebagai kelompok anti demokrasi dan kedamaian, sebaliknya MMI menyatakan jika demokrasi Barat yang dipaksakan untuk diterapkan pada negara muslim, maka hanya merupakan dalih untuk menghegemoni dan mengeksploitasi. Demi kepentingannya, banyak di antara negara muslim yang dihancurkan Amerika dan sekutunya (AS). Tanpa menggunakan dasar dan aturan main internasional, seringkali Barat menuduh tanpa bukti, atau dengan bukti tapi yang direayasa, hanya untuk dijadikan alasan invasi militer seperti kasus di Irak. Jika dicermati lebih jauh, kiprah AS beserta sekutunya telah banyak membuat tragedi kemanusiaan, dari pada kebaikan. Irfan S. Awwas dalam hal ini mengatakan:

“Amerika dan sekutunya (AS) itu tidak suka dengan Islam, mereka memposisikan Islam sebagai musuhnya, terbukti dari berbagai tindakan yang dilakukan di kawasan negara muslim,

semuanya menyetabkan kekacauan dan tragedy kemanusiaan. Lihat saja Irak, yang dituduh mempunyai senjata pemusnah massal, mana buktinya? Seharusnya Barat itu yang harus dicap sebagai teroris dunia. Dengan seenaknya melakukan tindakan militer tanpa dasar dan aturan, mestinya mereka malu karena mereka paling banyak membunuh dan melanggar HAM".⁵⁴

Begitu juga di Indonesia, Barat telah menghegemoni pemerintah untuk kepentingannya, ini menjadi ancaman bagi kelangsungan umat Islam. Seperti halnya masalah terorisme, pemerintah Indonesia seakan tunduk pada kampanye AS dan sekutunya, hanya berdasarkan laporan Sidney Jones, mereka berkesimpulan jika MMI dimasukkan dalam daftar teroris, ini jelas tidak benar. Dari sini sebenarnya AS dan sekutunya, ingin mengendalikan negara Islam dan menghambat tegaknya syari'at Islam di Indonesia, karena para aktivisnya difitnah dengan stigma cap teroris, padahal terorisme bisa dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai keinginan untuk melakukannya. Seperti, dari kalangan petani, buruh, preman, aparat keamanan, pedagang, dan seterusnya. Menurut MMI, terorisme mempunyai mekanismenya sendiri, dan itu tidak terkait dengan gerakan syari'at Islam yang diperjuangkan oleh Majelis Mujahidin.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan Shobbarin Syukur, 2 Mei 2006, di Markaz Pusat MM.

⁵⁵ *Ibid.*

MMI sebenarnya mengutuk tindakan meledakkan bom, untuk atas nama jihad dan masuk surga, seperti yang disampaikan oleh Muhammad Tholib sebagai berikut:

“Jihad melawan kafir dan Barat itu harus menggunakan cara yang pintar, jangan meledakkan bom lalu disebut syahid, enak saja ... ngebom orang lalu syahid.”⁵⁶

Dari sini, MMI secara tegas tidak setuju jika melawan AS dan sekutunya (Barat) itu menggunakan cara yang tidak seimbang, seperti halnya melakukan peledakan bom di tempat umum lalu dianggap mati syahid. Tholib menganjurkan jihad melawan AS dengan cara yang ilmiah dan seimbang.

Sampai di sini, terdapat hal yang menarik, yakni jika dikaitkan dengan beberapa peristiwa kekerasan dalam agama atau radikalisme agama yang akhir-akhir ini marak di berbagai kawasan di Indonesia, termasuk peledakan bom (dikenal dengan bom bunuh diri), yang diklaim untuk melawan AS dan sekutunya, sepertinya telah kehilangan relevansinya. Dengan dalih apapun, meledakkan diri di tempat umum dengan sasaran warga asing apalagi mengklaim untuk berjihad melawan musuh Allah, adalah tindakan yang tidak dibenarkan, bahkan Tholib melihatnya sebagai hal yang tidak masuk kategori syahid. Dengan demikian, berarti MMI tidak membenarkan fatwa yang mengarah kepada

⁵⁶ Wawancara dengan Muhammad Tholib, 21 Mei 2006, di Markaz Pusat MMI.

pengeboman dengan dalih jihad agama dan mengklaim pelakunya sebagai syuhada.

Terlepas dari kejelekannya, sebenarnya Barat juga tidak sepenuhnya buruk, banyak unsur yang datang dari Barat dapat memberikan manfaat kabaikan bagi Islam. Seperti, beberapa hal yang menyangkut teknologi, kesehatan, dan ekonomi telah memberikan nilai *plus* bagi dunia Timur. Kemajuan yang diperoleh Barat kiranya ada yang perlu diadopsi untuk kepentingan kemajuan masyarakat Islam juga. Muhammad Sa'id al-Asymawi, seorang cendekiawan Mesir menyatakan:

“Budaya di dunia Barat tidak sepenuhnya buruk. Budaya Barat juga memiliki nilai-nilai luhur seperti organisasi, kesehatan, kredibilitas, kecermatan, inovasi, perencanaan, kerjasama, dan pelayanan terhadap orang lain. Nilai-nilai ini membentuk bagian dunia spiritual-konseptual. Budaya Barat tidak hanya materialistik. Ini berakibat tak seorang pun atau kelompok orang pun memiliki hak untuk melindungi. Melindungi semua orang secara nasional (*dar al-Islam*) atau internasional (*khilafah*) akan melahirkan *tiran* yang fasis atas nama agama, sebagai yang terburuk”.⁵⁷

Dunia Barat dan orientalisme memang muncul sebagai kekuatan yang banyak berkiprah dan mengkaji Timur (Islam) dalam perspektif mereka, namun kehadirannya tidak mesti ditanggapi sebagai musuh. Namun, lebih kepada dinamika sosial dan intelektual yang membutuhkan kritik serta koreksi dari pihak Timur (Islam) jika terjadi kesalahan atau pembelokan tentang

⁵⁷ David Sagiv, *Islam dan Otentitas*, hlm. 206.

sesuatu yang dapat merusak dan merugikan, Islam jangan terprovokasi untuk melakukan hal yang sama. Namun bagaimana Islam bisa ditampilkan secara benar menurut kaidah moral, intelektual, budaya dan akademik oleh pihak Islam sendiri, jangan gampang menyalahkan Barat dan orientalisme, jika umat Islam sendiri tidak mau berbuat sebaliknya seperti yang pernah dikampanyekan oleh Hassan Hanafi, yaitu kiri Islam, suatu kajian yang mencoba mengarahkan para kaum cendekiawan Timur (Islam) untuk mengkaji tentang Barat dan Kristen, agar nantinya terjadi keseimbangan.

C. Tawaran Alternatif.

Terdapat dari *counter* Islam liberal, sekularisme, orientalisme, Barat bagaimanapun, gagasan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia, yang mayoritas penduduknya muslim, dapat dibenarkan tetapi dengan beberapa persyaratan yang tidak boleh diabaikan. *Pertama*, dalam konvensi internasional syariat Islam itu dilindungi dan dapat diberlakukan hanya untuk komunitas muslim dan memberikan perlindungan terhadap minoritas *non-muslim*. Dalam konteks ini, secara konseptual Islam telah memberi alternatif *ahl al-dhimmi*, tetapi bukan sebagai kelas kedua (*second class*).⁵⁸

⁵⁸ Zakiyuddin Baidhawy, *Ambivalensi Agama dan Konflik*, hlm. 242.

Kedua, dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, pemberlakuan syari'at Islam harus memperoleh dukungan masyarakat luas. Perlu dicatat bahwa sepanjang sejarah pemilu di Indonesia dari tahun 1955 hingga 2004, belum pernah ada partai Islam yang memperoleh suara mayoritas. Eep Syaifullah Fattah membuktikan tidak adanya korelasi antara semakin "muslim"nya seseorang, semakin tingginya kecenderungan untuk memilih partai Islam.⁵⁹ Hal ini membuktikan jika mayoritas muslim Indonesia masih belum sepenuhnya mendukung ide MMI yang ingin menerapkan syari'at Islam di Indonesia.

Ketiga, pemberlakuan syari'at Islam membutuhkan dukungan semua pilar umat Islam. Masalahnya hingga kini belum tampak secara nyata proses konsolidasi visi-misi di kalangan umat Islam baik di garis politik maupun keagamaan. Partai politik Islam yang muncul lebih mencerminkan egoisme masing-masing kelompok serta *power oriented*. Belakangan, justru dapat disaksikan konflik internal di tubuh mereka, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan PPP "Reformasi", yang kemudian berubah menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga terjadi konflik yang serius dan seterusnya. Organisasi-organisasi sosial-keagamaan, terutama Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua ormas Islam besar, juga belum menunjukkan kolaborasi yang signifikan. Sementara itu, pihak-pihak yang bersikeras ingin menerapkan syari'at Islam di Indonesia adalah

⁵⁹ *Ibid.*

kelompok minoritas.⁶⁰ Hal ini dibenarkan oleh Shobbarin Syakur, ia menyatakan:

“Penegakan syari'at Islam di Indonesia memang masih belum mendapatkan dukungan luas dari umat, tapi kita tetap yakin, jika suatu saat kebenaran akan menang, syari'at Islam akan tegak, entah kapan, sesuai dengan janji Allah. NU dan Muhammadiyah sudah pernah kita ajak, namun mereka tidak memberikan tanggapan positif, malah balik mereka bertanya: apa saja yang sudah dilakukan Majelis Mujahidin untuk bangsa dan negara?”⁶¹

Keempat, pemberlakuan syari'at Islam harus menjadi “kontrak sosial” yang melibatkan semua komponen bangsa Indonesia termasuk *non-muslim*. Mayoritas bukan berarti kesewenangan melakukan pemaksaan atas kelompok lain yang minoritas.⁶² Pemberlakuan syari'at Islam sebagai dasar dan sistem negara-bangsa memiliki dampak yang besar dan luas atas aspek-aspek kehidupan sosial, politik dan budaya. pemberlakuan syari'at Islam secara tergesa-gesa tanpa melalui debat publik yang panjang dan berjenjang, serta kontrak sosial yang terbuka dan adil, hanyalah sebuah *utopia*.

Terakhir, semuanya diserahkan kembali kepada umat Islam sepenuhnya. Tegaknya syari'at Islam di Indonesia (dengan atau tanpa) secara formal hanya akan berhasil, jika di antara umat Islam saling memahami dan mengerti tentang ajaran Allah yang sebenarnya. *Wallahu a'lam*.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 242-243.

⁶¹ Wawancara dengan Shobbarin Syakur, 21 Mei 2006, di Markaz Pusat MM.

⁶² Zakiyuddin Baidhawiy, *Ambivalensi Agama dan Konflik*, hlm. 243.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah diuraikan tentang Majelis Mujahidin Indonesia secara menyeluruh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Mujahidin Indonesia adalah organisasi yang lahir untuk menjadikan syari'at Islam sebagai landasan bermasyarakat dan bernegara. Majelis ini bersifat aliansi (*tansiq*), baik organisasi, kelompok atau individu muslim, atas dasar *ukhuhwah*, kesamaan akidah serta *manhaj* perjuangan, tanpa dibatasi suku, bangsa ataupun Negara. Berdirinya MMI dipelopori oleh para aktivis pro-syari'at Islam yang sebagian dari mereka adalah para tahanan politik di era Orde Baru karena melanggar undang-undang Anti-Subversif, seperti Abu Bakar Ba'asyir, Irfan Suryahardi Awwas, Shobbarin Syakur, Harun dan lain-lain.
2. Misi Majelis Mujahidin Indonesia sebagaimana tercantum dalam buku *Mengenal Majelis Mujahidin untuk Penegakan syari'at Islam* (MMMUPSI) adalah *Tathbiqus Syari'at* (tegaknya syari'at Islam) secara kaffah dalam kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Misi itu dilaksanakan dengan cara menerapkan syari'at Islam secara bersih dan benar termasuk menolak sistem demokrasi sekuler, yaitu suatu aturan negara yang tidak merujuk pada hukum Allah. Kepemimpinan umat juga harus bersih dari kaum kafir, munafik, serta orang berpaham sekuler.

3. Dalam upaya penegakan syari'at Islam di Indonesia, MMI secara tegas ingin mengganti sistem dan perundang-undangan negara Republik Indonesia dengan syari'at Islam. Menurut MMI, syari'at Islam wajib diamalkan dalam lembaga negara. Dari sini berarti MMI ada tujuan untuk mengganti konstitusi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD '45 dengan dasar hukum yang diambil dari al-Qur'an dan hadis menurut pemahaman MMI.
4. Terhadap isu terorisme yang sering dikaitkan dengan MMI, di sini tidak terdapat titik singgung yang membuktikan jika MMI secara organisatoris terlibat langsung dengan berbagai tindak terorisme di berbagai wilayah di Indonesia. Dikaitkannya MMI dan Ngruki sebagai basis al-Qaeda di Asia Tenggara, merupakan hal yang banyak membutuhkan klarifikasi dan pembuktian. Tindak terorisme bisa saja dilakukan oleh aktivis Islam yang mempunyai jaringan dan mekanismenya sendiri, bisa jadi pelaku bisa itu ada yang saling kenal dengan aktivis MMI, tapi MMI tidak pernah mengakui jika tindak pemboman adalah mereka yang melakukan.
5. Perjuangan MMI ternyata banyak ditentang oleh kalangan Islam sendiri, seperti mereka yang beraliran liberal dan sekuler. Dalam hal ini MMI secara tegas menyatakan jika kalangan liberal dan sekuler tidak boleh menjadi pimpinan. Dari eksternalnya MMI mendapat tekanan dari pihak Barat dan sekutunya. Di samping itu, peran orientalisme dianggap mempengaruhi pola pikir dan pandangan masyarakat Islam dalam sikap liberalisme beragama dan sekularisasi politik.

B. Saran-Saran.

1. Perlu dipahami bahwa penerapan syari'at Islam hendaknya dilakukan dengan cara santun, dialogis dan simpatik, agar masyarakat bisa menerimanya dengan baik, bukan dengan cara mengatakan orang lain kafir.
2. Peran lembaga asing dalam membuat opini tentang terorisme hendaknya dikaji secara kritis, agar tidak terjebak dengan pola yang dibangun oleh kekuatan asing, karena bisa merugikan negara dan bangsa kita.
3. Dalam memahami Islam, di dalam internal Islam sendiri hendaknya mampu membangun kekuatan harmoni dan dialog antar kelompok. Jangan sampai terjadi saling menyalahkan apalagi mengkafirkan antara kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain.
4. Syari'at Islam sebenarnya bisa ditegakkan di Indonesia, namun harus didukung oleh banyak pilar dan perlu diadakan kontrak sosial termasuk dengan minoritas *non-muslim* dan tidak memposisikannya sebagai masyarakat kelas dua.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Tiara Wacana Ilmu, 1999.
- Abegebriel. A. Maftuh, "Ada Apa dengan Dokumen JI? Sebuah Penghampiran Hermeneutik", dalam Abegebriel. A. Maftuh (ed.), *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopedia*, Yogyakarta: SR-Ins Publising, 2004.
- Abu. Murba, "Memahami Terorisme di Indonesia", dalam Abegebriel. A. Maftuh (ed.), *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopedia*, Yogyakarta: SR-Ins Publising, 2004.
- Ahnaf. Muhammad Iqbal, *MMI dan HTI; The Image of The Other*, dalam Abegebriel. A. Maftuh (ed.), *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopedia*, Yogyakarta: SR-Ins Publising, 2004.
- Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keacilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Bandung: Teraju, 2003.
- Arief. Abd Salam, "Politik Islam antara Akidah dan Kekuasaan" dalam Abegebriel. A. Maftuh (ed.), *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopedia*, Yogyakarta: SR-Ins Publising, 2004.
- Awwas. Irfan S. (ed.), *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2003.
- _____, *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'at Islam (Seri Publikasi)*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2001.
- _____, "ICG dan Kesaktian Sidney Jones", dalam Umar Abduh (ed.) *Konspirasi Intelejen dan Gerakan Islam Radikal*, Jakarta: Center for Democracy and Social Justice Studies, 2003.
- _____, *Pengadilan Teroris; Klarifikasi Data dan Fakta yang Terungkap di Persidangan*. Yogyakarta: Wihdah Press, 2004.
- _____, *Sepuluh Musuh Cita-cita Menuju Indonesia Baru Berlandaskan Islam*, Yogyakarta: Wihdah Press, 1999.
- Ba'asyir. Abu Bakar, "Mengenal Watak Orang Kafir", dalam *Pidato Kaset Rekaman* (Solo: al-Ghuraba Record, Grogol, Sukoharjo, t.t).

-, "Pidato Amanah Amirul Mujahidin", dibacakan pada Kongres Mujahidin II, di Solo, 2003.
- Baidhawiy. Zakiyuddin, *Ambivalensi Agama dan Konflik Nirkekerasan*, Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Bashari. H. Luthfi, *Musuh Besar Umat Islam; Zioneisme, Sekularisme, Atheisme, Sinkretisme, Salibisme, JIL, Oportunisme*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2003.
- Burke. Peter, *Sejarah dan Teori Sosial*, Jakarta: YOI, 2001.
- Dengel. Holk H., *Darul Islam dan Kartosuwiryo: "Angan-angan yang Gagal"*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Dokumentasi Kajian Ahad pagi, Markaz Pusat Majelis Mujahidin, 29 Februari 2004.
- Firdaus AN., "Saat Umat Islam Bertindak", sebagai appendix kedua yang terdapat dalam buku Irfan S. Awwas, *Menelusuri Perjalanan Jihad SM. Kartosuwiryo*, cet. II, Yogyakarta: Wihdah Press, 1999.
- Gatra*, "Membongkar Misteri Penebus Dosa", 6 September, 2003.
- Ghorara. Mukhlas Syarkun dan W., "Dunia Islam dalam Benturan Kepentingan dan Peradaban", dalam Abegebriel. A. Maftuh (ed.), *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia*, Yogyakarta: SR Ins Publicing, 2004.
- Gotschalk. Louis, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI-Press, 1992.
- Habib. Hasnan, "Peta Politik Internasional dan Pengaruhnya terhadap Konstalasi Perpolitikan Indonesia", *Paper* disampaikan di forum Munas Alim Ulama DPP PKB, 28 Mei 2003.
- Hadi. Sutrisno, *Metodologi Research*, Vol.I, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- <http://acehupdate.degromisi.nl/archives/001475.php>.
- <http://mediacare.blogspot.com/2006/03/anggota-tni-terlibat-mmi-akhirnya.html>.
- http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=477&_schema=PORTAL30&pared_id=340837&patop_id=W20.

<http://www.majelis-mujahidin.com/subyektivitas/jihad/2004/01.html>.

<http://www.majelismujahidin.com/doktrin/rutan/2003/08.html>.

<http://www.majelismujahidin.com/sejarah/nkri/op.cit>.

<http://www.tempointeractiv.com/majelismujahidin/tapol/op.cit>.

<http://www.tempointeractiv.com/majelis-mujahidin.com/sejarah/syariat-islam/mmi.html>.

<http://www.detik.com/peristiwa/adil/laput/2002/10/31/20021031-111527.html>.

<http://www.majelismujahidin.or.id/new/herita/warta-lokal/sekilas.abubakar%27asyir>.

ICG Indonesia Briefing, "Impact of Bali Bombings", 24 Oktober 2002.

_____, *Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the Ngruki*, 8 Agustus 2002 dan dikoreksi pada 10 Januari 2003.

Iqbal. Muhammad, *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara Kerjasama dengan penerbit Misaka Galiza, 2004.

Jahroni. Jamhari dan Jajang (peny.), *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Jauhari, dalam kajian Ahad pagi tanggal 21 Mei 2006, di Markaz Pusat MM.

Jones. Sidney, "Hambali adalah Petinggi al-Qaeda", *Tempo*, 3 November 2002.

_____, "Hambali is a High-Level al-Qaeda Operative", Wawancara dalam *Tempo* 3 November 2003.

Kajian Ahad Pagi di Markaz Pusat MM, Karanglo, Kotagede, Yogyakarta.

Kleden. Iqnes, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta: LP3ES, 1988.

- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001.
- Mahendra. Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam; Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jema'at al-Islami (Pakistan)*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mujahidin. Dewan Pimpinan Majelis, *Risalah Kongres Mujahidin II, berkas yang belum di cetak.*
- Nasution. Harun, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Noer. Deliar, "Penegakan Syari'at Islam dalam Pentas Politik Nasional", *Makalah*, disampaikan pada saat Kongres Mujahidin I yang berlangsung tanggal 5-7 Agustus 2000.
- Rahnema. Ali (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Ilyas Hasan (terj.), Bandung: Mizan, t.t.
- Raziq. Ali Abd al-, *Al-Islam wa Ushul al-Hukum: Bahs al-Khilafiyah wa al-Hukumah fi al-Islam*, Kairo: Maktabah al-Musyarakah, 1925.
Republika, 22 September 1998.
- Sagiv. David, *Islam Otentisitas Liberalisme*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Shalih. Sa'aduddin as-Sayyid, *Jaringan Konspirasi Menentang Islam*, Yogyakarta: Wihdah Press, 1999.
- Sjadzali. Munawir, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UMAT ISLAM-Press, 1990.
- Skema gerakan Islam radikal versi CeDSoS (Center for Democracy and Social Justice Studies)
- Soelaeman. M. Munandar, *Ilmu Sosial Dasar; Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Supriyadi. Dedi, *Konspirasi Dibalik Bom Bali: Sekenario Membungkam Gerakan Islam*, Jakarta: Bina wawasan Press, 2003.
- Susanto. Nugroho Noto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*, Jakarta: Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata, 1964.

Susanto. Nugroho Noto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, Jakarta: Intidayu Press, 1984.

Tabloid Forum Keadilan, "Mujahidin Berkongres, Proyek Besar Diproses", 20 Agustus, 2000.

Tabloid TEKAD, "Bangkitnya Pengikut Kartosuwiryo", tanggal 14-20 Agustus 2000.

Tarigan. Azhari Akmal, "Penerapan Syari'at Islam di Indonesia dalam Perspektif Islam Liberal", dalam *Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sumatra Utara Kerjasama dengan penerbit Misaka Galiza, 2004.

Tempo. "Jejak Ba'asyir di Sungai Manggis", 3 November 2002, hlm. 28-30.

_____, 14-20 Agustus 2000, "Gelora Meluap Para Mujahidin", hasil wawancara R. Fadji dari *Tempo* dengan Irfan S. Awwas.

_____, Anonim, "*N-Selaras dalam Berbagai Wujud*", 5 Maret 2000.

Tim, *Mengenal Majelis Mujahidin untuk Penegakan Syari'at Islam*, Yogyakarta: Karanglo, Kotagede, Markas Pusat Majelis Mujahidin, t.t.

Tim, *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'at Islam* yaitu buku Seri Publikasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Majelis Mujahidin, Yogyakarta: Wihdah Press, 2001.

Tim, *Tashwirul Afkar*, Jakarta: Lakspesdam dan TAF Edisi No. 13 tahun 2002.

W.JS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Wahid. Hasyim dkk., *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Wawancara dengan Anggota Laskar Mujahidin Majelis Mujahidin, Rabu 17 Mei 2006, di Markaz Pusat Majelis Mujahidin, Karanglo, Kotagede, Yogyakarta.

Wawancara dengan Irfan S. Awwas, 18 Mei 2006, di Markaz Pusat MM.

Wawancara dengan Muhammad Tholib, 21 Mei 2006, di Markaz Pusat MM.

Wawancara dengan Shabbarin Syakur, 26 Mei 2006, di Markaz Pusat MM.

Wawancara di Markaz Pusat Majelis Mujahidin, 3 Maret 2003, dikutip dalam <http://www.majelismujahidin/doktrin/rutan/2003/08.html>.

ZA. Maulani dkk., *Terorisme: Konspirasi Anti Islam* (ed.) Abduh Zulfidar Akaha, Jakarta: Al-Kautsar, 2002.

ZA. Maulani, Amin Rais, dkk., *Islam dan Terorisme: dari Minyak sampai Hegemoni Amerika*, Yogyakarta: UCY Press, 2003.

Zuhro. Yayan, "Strategi Dakwah Majelis Mujahidin Indonesia dalam Mengkomunikasikan Ajaran Islam kepada Masyarakat D.I Yogyakarta" *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2006.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA